



## C. EVALUASI KINERJA

### Sasaran 1 :

#### “Meningkatnya SDM Aparat”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya SDM aparat dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 99,65 dengan predikat ***Sangat Berhasil***.

Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Tingkat penurunan pelanggaran disiplin pegawai dengan angka capaian kinerja sebesar 100.
2. Aparat yang mendapat penghargaan dengan angka capaian kinerja sebesar 98,95.
3. Tertib pelayanan administrasi kepegawaian dengan angka capaian kinerja sebesar 100.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

1. Tingkat penurunan pelanggaran disiplin pegawai, persentase pencapaian rencana sebesar 571,43% atau teraliris 28,57% dari rencana sebesar 5%.

Pelanggaran Disiplin Pegawai tahun 2010 sebanyak 10 orang, sedangkan untuk tahun 2009 sebanyak 35 orang, sehingga menurun sebesar 28,57% seperti tabel berikut:

**Tabel 7 Pelanggaran Disiplin PNS Kabupaten Sleman Tahun 2009-2010**

No	Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Hukuman Ringan	8	5
2	Hukuman Sedang	3	0
3	Hukuman Berat	24	5
	Jumlah	35	10



2. Aparat yang mendapat penghargaan Aparat yang mendapat penghargaan, persentase pencapaian rencana sebesar 98,99% atau terealisasi sebesar 19,80% dari rencana sebesar 20%.

Pada tahun 2010 pegawai yang mendapatkan berbagai penghargaan sebanyak 2.656 orang atau 19,80% dari jumlah seluruh pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten sebanyak 13.415 orang, Prosentase pegawai yang mendapatkan penghargaan tahun 2010 meningkat dibandingkan pada tahun 2009 seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 8 Aparat Yang Menndapat Penghargaan Tahun 2009-2010.**

No	Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Satya Lencana	598	405
2	Talikasih Purna Tugas	402	400
3	Kenaikan Pangkat	693	1.848
4	Perhitungan Masa Kerja	3	3
	Jumlah	1.696	2.656

3. Tertib pelayanan administrasi kepegawaian, persentase pencapaian rencana sebesar 113,04% atau terealisasi sebesar 101,74% dari rencana sebesar 90%.

Pelayanan administrasi kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Sleman, dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman, pelayanan administrasi kepegawaian yang mendasar diberikan kepada seluruh Aparat Pemerintah Kabupaten Sleman antara lain : pelayanan pengangkatan PNS; pelayanan kenaikan pangkat; dan pelayanan pensiun.

Pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Sleman telah memberikan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu rata-rata sebesar 101,74% dengan rincian:



a. Pengangkatan PNS tepat waktu sebesar 97,41%.

Pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Sleman mengangkat PNS dengan target sebanyak 540 orang, realisasi sebanyak 526 orang atau sebesar 97,41%.

Dapat kami informasikan lebih lanjut, pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan pengadaan CPNS sejumlah 515 orang yang terdiri dari CPNS tenaga honorer 184 dan pelamar umum 331 orang. Dari 515 orang tersebut yang tidak dapat diangkat menjadi PNS sebanyak 4 orang karena, 1 orang mengundurkan diri dan 3 orang tidak memenuhi syarat. Dan masih terdapat 9 orang belum diangkat menjadi PNS karena 8 orang belum mengikuti diklat Prajabatan, 1 orang belum melaksanakan uji kesehatan.

Pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan pengadaan CPNS sejumlah 426 orang yang terdiri dari CPNS tenaga honorer 59 dan pelamar umum 367 orang. Pada tahun 2010 sebanyak 419 orang telah diangkat menjadi PNS, sisanya 7 orang tidak dapat diangkat karena tidak memenuhi syarat.

b. Pelayanan kenaikan pangkat tepat waktu sebesar 99,09%

Pada tahun 2010 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman menerima pengusulan untuk memproses kenaikan pangkat PNS dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman sebanyak 1.865 orang dan telah terealisasi sebanyak 1.848 orang atau 99,09%, sisanya sebanyak 17 orang tidak dapat direalisasikan karena tidak memenuhi persyaratan antara lain: nilai angka kredit belum memenuhi, Penilaian DP3 tidak memenuhi, telah mencapai pangkat puncak.

c. Pelayanan administrasi pensiun tepat waktu sebesar 108,71%

Berdasarkan register penjagaan pensiun, terdapat 551 Aparat Pemerintah Kabupaten Sleman yang akan memasuki masa purna tugas pada tahun 2010. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman telah memproses dokumen pengusulan pensiun dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, dan sebanyak 597 orang atau 108,71% telah



menerima Surat Keputusan Pensiun sebelum memasuki masa purna tugas, realisasi melampaui target karena adanya pengajuan pensiun atas permintaan sendiri.

Sasaran meningkatnya SDM aparat dicapai melalui program utama sebagai berikut:

1. Peningkatan pengelolaan SDM aparatur;
2. Peningkatan kesejahteraan aparat,
3. Peningkatan profesionalisme aparatur dan pejabat negara,

Sasaran ini didukung dengan 38 kegiatan, capaian rata-rata indikator kinerja out put sebesar 100%. Dari 38 kegiatan terdapat 6 kegiatan yang pencapaian indikator kinerja out put dibawah 80% yaitu: kegiatan ujian dinas, Seleksi penerimaan calon PNS, Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, Pengelolaan kenaikan pangkat PNS dan peninjauan masa kerja, Pengangkatan CPNS dan PNS serta sumpah PNS dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Tidak terlaksananya kegiatan tersebut tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap pencapaian kinerja sasaran.

Sasaran ini didukung dana sebesar Rp11.579.534.000,00 ( 80,67%) dari target sebesar Rp14.354.387.000,00; sehingga daya dukung terhadap pencapaian kinerja sasaran sangat signifikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Tingginya kesadaran dari pengelola kepegawaian masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam mengoperasikan SIMPEG.
2. Kejelasan sistem pengembangan karier bagi pejabat struktural maupun fungsional.

#### **Hambatan/masalah:**

Belum seluruh jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan pemerintah diterapkan Kabupaten Sleman.

#### **Strategi/ upaya pemecahan:**

Sosialisasi dan memberikan kemudahan serta penghargaan lebih bagi jabatan fungsional.



## Sasaran 2 :

### **“Meningkatnya efisiensi birokrasi”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya efisiensi birokrasi dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Standard Operating Procedure (SOP) yang telah dimiliki instansi, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 87,50 dengan predikat ***Sangat Berhasil***.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut: Standard Operating Procedure (SOP) yang telah dimiliki oleh instansi sampai dengan tahun 2010 ditarget telah mencapai 56 (lima puluh enam) jenis.

Jumlah SOP sampai dengan tahun 2009 sebanyak 46 SOP yang terdiri dari 28 buah SOP perijinan dan 18 buah SOP non perijinan; pada tahun 2010 telah tersedia penambahan SOP sebanyak 3 SOP sehingga jumlah SOP sampai dengan tahun 2010 mencapai 49 SOP atau 87,50% dari rencana sebanyak 56 SOP.

Adapun ketiga SOP yang disusun pada tahun 2010 yaitu:

1. SOP yang mengatur prosedur penggunaan dana penguatan modal melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Dana Penguatan Modal
2. SOP yang mengatur Mekanisme Pelayanan Informasi Media Massa melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelayanan Informasi Media Massa.
3. SOP yang mengatur penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas selain SOP yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati; di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga berpedoman kepada Juklak maupun Juknis program / kegiatan yang diterbitkan oleh masing-masing Pimpinan OPD.

Dapat kami informasikan sampai saat ini terdapat draf SOP sebanyak 24 jenis yang masih dalam pembahasan yaitu:



1. Draf SOP perizinan sebanyak 17 jenis meliputi:
  - a. SOP Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
  - b. SOP Izin Mendirikan Bangunan
  - c. SOP Izin Gangguan
  - d. SOP Izin Usaha Pondok Wisata
  - e. SOP Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
  - f. SOP Izin Usaha Hotel dan Tanda Bunga Melati
  - g. SOP Izin Usaha Rumah Makan
  - h. SOP Izin Usaha Restoran
  - i. SOP Izin Usaha Perkemahan Wisata
  - j. SOP Izin Usaha Kawasan Wisata
  - k. SOP Izin Usaha Informasi Wisata
  - l. SOP Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata
  - m. SOP Izin Usaha Pramuwisata
  - n. SOP Izin Usaha Hotel Berbintang
  - o. SOP Izin Usaha Angkutan Wisata
  - p. SOP Izin Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pamearan
  - q. SOP Perizinan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi (Agen Elpiji, Agen Minyak Tanah, Depot Lokal, Pangkalan Minyak Tanah, Pengumpulan dan Penyaluran pelumas Bekas, Stasiun Pengisian dan pengangkutan Bulk Elpiji, SPBU dan SPBU Mini).
2. Draf SOP non perizinan sebanyak 7 jenis meliputi:
  - a. SOP Penegakan Peraturan Daerah
  - b. SOP Pengelolaan Pasar Hewan
  - c. SOP Pengelolaan Taman Kuliner
  - d. SOP Keprotokolan



- e. SOP Penerimaan Tamu
- f. SOP Pengamanan Dokumen
- g. SOP Pengelolaan dana Gotong Royong

Capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya efisiensi birokrasi, dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	2009			2010		
	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja
SOP yang telah dimiliki instansi	46 jenis	46 jenis	100	56 jenis	49 jenis	87,50

Sasaran tersebut dicapai melalui program utama Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan 9 Kegiatan, capaian rata-rata indikator kinerja out put sebesar 100% dengan realisasi dukungan dana Rp830.997.000,00( 89,49%) dari target sebesar Rp928.641.000,00; sehingga daya dukung terhadap pencapaian kinerja sasaran sangat signifikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Tingginya komitmen dari pihak yang berkompeten tentang urgensi standar kerja yang menjamin kepastian hak dan kewajiban baik bagi penyelenggara maupun penerima jasa layanan publik,
2. Meningkatnya kesadaran aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. dukungan sumber daya yang ada, yaitu sumber daya manusia, sarana, prasarana dan keuangan.

#### **Hambatan/masalah:**

Permasalahan dalam penerapan SOP adalah SOP sebagai sebuah sarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas belum dirasakan sebagai sebuah kebutuhan serta ketidakjelasan akan jumlah dan jenis SOP yang perlu disiapkan dan dibutuhkan instansi. Disamping itu, belum adanya format yang baku tentang SOP atau standar kerja, cukup menyulitkan dalam penyusunan SOP masing-masing kegiatan/pelayanan publik



### **Strategi/ upaya pemecahan:**

Dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi SOP serta prioritas penyusunannya serta terus mengupayakan dan memprioritaskan penyusunan SOP di berbagai instansi dalam rencana program kegiatan Pemerintah Daerah, dan mengintensifkan implementasi SOP yang telah ada.

### **Sasaran 3:**

#### **“Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 97,02 dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan masyarakat dengan angka capaian kinerja sebesar 94,05.
2. Penanganan pengaduan masyarakat dengan angka capaian kinerja sebesar 100.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat, persentase pencapaian rencana sebesar 94,05%, atau angka rata-rata IKM terealisasi sebesar 75,24 dari rencana angka rata-rata IKM sebesar 80.

Pengukuran indikator sasaran tersebut dilakukan dengan melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan pada RSUD Sleman, RSUD Prambanan dan Puskesmas Sleman dengan hasil sebagai berikut:

- RSUD Sleman dengan nilai 74,64 termasuk kategori mutu pelayanan "baik"
- RSUD Prambanan dengan nilai 72,87 termasuk kategori mutu pelayanan "baik"





- Puskesmas Sleman dengan nilai 78,21 termasuk kategori mutu pelayanan "baik"

Hasil dari survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik tersebut diatas menghasilkan nilai dengan angka rata-rata 75,24. Angka ini memberikan arti bahwa pelayanan publik yang diukur dari mutu pelayanan dan kinerja pada ketiga instansi dimaksud masuk dalam kategori "baik".

Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik pada tahun 2010 sebesar 75,24 lebih rendah apabila dibandingkan pada tahun 2009 sebesar 76,05; tetapi untuk peningkatan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Sleman terus mengupayakan perbaikan kualitas pelayanan antara lain:

- a. Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai upgrade dari UPTPSA yang menjalankan fungsi "front office plus" dalam pelayanan perizinan Pemerintah Kabupaten Sleman. Organisasi perangkat Daerah tersebut mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2010.
- b. Memperbaiki standar pelayanan dengan menerapkan standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 atau ISO 9001:2008 pada 21 unit kerja yang terdiri :
  - 16 Puskesmas (Depok 1, Mlati 2, Minggir, Prambanan, Gamping 1, Mlati 1, Kalasan, Ngemplak 1, Sleman, Godean 2, Depok 2, Seyegan dan Godean 1, Ngaglik 1, Depok 3, Pakem),
  - Dinas Kesehatan
  - RSUD Sleman,
  - 6 Sekolah (SMK N 1 Depok, SMK N 2 Depok, SMK N 1 Kalasan, SMK N 1 Godean, SMK N 1 Tempel, SMK Nasional Berbah).
- c. Melaksanakan proses sertifikasi standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 atau ISO 9001:2008 pada SMK N 1 Seyegan.
- d. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atas 28 unit kerja Penetapan BLUD dimaksudkan agar



pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan lebih efisien dan tepat waktu, adapun 28 unit kerja tersebut terdiri dari 1 unit kerja BLUD Penuh yaitu RSUD Sleman dan 27 unit kerja BLUD Bertahap yaitu 25 Puskesmas se-Kab Sleman, 1 unit kerja JPKM, 1 unit kerja Labkes.

2. Penanganan pengaduan masyarakat, persentase pencapaian rencana sebesar 125% atau terealisasi 100% dari rencana sebesar 80%.

Pengukuran indikator sasaran dilakukan dengan membandingkan jumlah respon yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman atas seluruh pengaduan masyarakat, respon tersebut direalisasikan dalam bentuk koordinasi tindak lanjut dengan instansi terkait berdasarkan materi permasalahan yang ada.

Penanganan pengaduan masyarakat yang diukur melalui :

- a. Penanganan atas pengaduan masyarakat yang masuk melalui SMS (Short Message Service) pada nomor 2740 dan online call dengan nomor 08112500666 dikoordinir oleh Bagian Humas Setda Kabupaten Sleman, pada tahun 2010 terdapat 20 permasalahan dan seluruh permasalahan telah dapat tertangani atau 100%.
- b. Penanganan pengaduan masyarakat pada Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Sleman, terdapat 16 keluhan yang masuk dan telah dapat tertangani sebanyak 16 keluhan atau 100%.
- c. Penanganan pengaduan pada Inspektorat Kabupaten Sleman, terdapat 25 kasus dan telah dapat ditangani sebanyak 25 kasus atau 100%.

Untuk meningkatkan kualitas transparansi dan kualitas penanganan pengaduan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyediakan sarana dan prasarana antara lain:

- 1) Menyediakan sarana pengaduan masyarakat melalui portal SIMPPT (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu)
- 2) Menyelenggarakan website [www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id) sehingga terbuka akses informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.



- 3) Penanganan masukan/keluhan masyarakat dengan menggunakan teknologi SMS (Short Message Service) pada nomor 2740 dan online call dengan nomor 08112500666.
- 4) Monitoring berita media dilakukan oleh Bagian Humas untuk memberikan respon yang cepat atas permasalahan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
- 5) Penanganan aduan masyarakat melalui pemeriksaan kasus oleh Inspektorat Kabupaten.
- 6) Penanganan kebutuhan informasi, pengaduan, dan penyampaian keluhan terkait pelayanan perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman.

Capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan masyarakat, dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	2008			2009		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Indeks kepuasan masyarakat	80	76,05	95,06	80	74,24	94,05
Penanganan pengaduan masyarakat	100%	100%	100	80%	100%	100

Sasaran tersebut dicapai melalui program utama :

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Pengembangan kualitas kebijakan publik

Sasaran ini didukung dengan 30 kegiatan dengan didukung dana Rp1.935.373.000,00 (64,93%) dari target sebesar Rp2.980.510.000,00; sehingga daya dukung terhadap pencapaian kinerja sasaran sangat signifikan. Meskipun dari 30 kegiatan tersebut, terdapat 1 kegiatan yang capaian kinerja out put kegiatan dibawah 80% yaitu Penyelesaian permasalahan Kepala Desa dan Perangkat Desa.



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Tingginya respon dari Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap tuntutan transparansi dan semakin kritisnya pola pikir masyarakat sehingga dilakukan dengan cara memberikan fasilitas bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan baik secara langsung maupun melalui media elektronik.
2. Komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan manajemen pelayanan publik yang lebih baik.

**Hambatan/masalah:**

1. Dari hasil survey kepuasan masyarakat pada RSUD Sleman, RSUD Prambanan dan Puskesmas Sleman masih terdapat unsur-unsur yang belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, antara lain kenyamanan lingkungan, hal tersebut berkait dengan kesiapan SDM dan keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan.
2. Penanganan pengaduan lewat SMS meskipun bisa langsung direspon, namun ada beberapa penanganan pengaduan yang penyelesaian akhirnya masih memerlukan koordinasi lebih lanjut.

**Strategi/ upaya pemecahan:**

1. Mengikutsertakan pelaku pelayanan masyarakat dalam pelatihan-pelatihan dan mengoptimalkan sarana prasarana pendukung pelayanan yang tersedia serta mendesain tata letak/ruang pelayanan masyarakat serta
2. Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelesaian pengaduan masyarakat..

**Sasaran 4 :**

**”Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dengan 3 (tiga) indikator kinerja, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 84,88 dengan predikat **Berhasil**.

Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut :



1. Peningkatan PAD dengan angka capaian kinerja sebesar 54,64.
2. Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dengan angka capaian kinerja sebesar 100.
3. Tertib administrasi pengelolaan kekayaan daerah dengan angka capaian kinerja sebesar 100.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan PAD, persentase pencapaian rencana sebesar 54,64% atau teralisasi sebesar 3,83% dari rencana sebesar 7%.

Penerimaan PAD tahun 2010 sebesar Rp.163.632.984.321,97 atau mengalami peningkatan sebesar 3,83% dari tahun 2009 sebesar Rp. 157.604.530.382,84.

Tidak tercapainya target peningkatan PAD dari target yang ditetapkan sebesar 7% antara lain disebabkan adanya bencana erupsi Gunung Merapi tanggal 26 Oktober 2010 menyebabkan kunjungan wisata dalam negeri maupun manca negara mengalami penurunan yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD dari sektor retribusi pariwisata, pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan.

2. Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, persentase pencapaian rencana sebesar 100,69% atau terealisasi sebesar 95,65% dari rencana sebesar 95%,

Pengukuran indikator kinerja ini dengan mengukur ketepatan waktu dari penyerahan laporan keuangan daerah kepada BPK dan penyerahan laporan keuangan OPD kepada Bupati.

- a. Laporan Keuangan Daerah (LKD) Kabupaten Sleman tahun 2009 telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) Perwakilan DIY pada tanggal 31 Maret 2010, hal ini telah sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,



bahwa Pemerintah Daerah menyerahkan LKD kepada BPK selambat-lambatnya 3 bulan setelah anggaran berakhir.

- b. Laporan keuangan OPD tahun 2009, sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006, masing-masing OPD menyerahkan laporan keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah anggaran berakhir kepada Bupati. Dari 46 OPD yang menyerahkan Laporan keuangan tahun 2010 secara tepat waktu sebanyak 42 OPD atau 91,30%.

Dengan demikian rata-rata realisasi tertibnya pengelolaan keuangan daerah sebesar 95,65%.

3. Tertib administrasi pengelolaan kekayaan daerah, persentase pencapaian rencana sebesar 113,35% atau terealisasi sebesar 79,35% dari rencana sebesar 70%.

Pengukuran indikator kinerja ini dengan mengukur ketepatan waktu dari penyerahan laporan kekayaan daerah dari masing-masing OPD kepada Bupati.

Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, masing-masing OPD menyerahkan laporan pengelolaan kekayaan daerah kepada Bupati setiap semester.

Dari 46. OPD yang menyerahkan Laporan pengelolaan kekayaan daerah semester I tahun 2010 secara tepat waktu sebanyak 46 OPD atau 100%.

Pada semester II tahun 2010 OPD yang menyerahkan Laporan pengelolaan kekayaan daerah secara tepat waktu sebanyak 27 OPD atau 58,70%

Dengan demikian rata-rata realisasi tertibnya pengelolaan kekayaan daerah sebesar 79,35%.

Pencapaian kinerja dari sasaran Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Indikator Kinerja	2009			2010		
	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja
Peningkatan PAD	7%	12,07%	100	7%	3,83%	54,64
Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	-	-	-	95%	97,62%	100
Tertib administrasi pengelolaan kekayaan daerah	-	-	-	70%	79,35%	100

Sasaran tersebut dicapai melalui program utama peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dengan 65 kegiatan dengan didukung dana Rp19.281.875.000,00 ( 79,28.%) dari target sebesar Rp24.320.854.000,00; sehingga daya dukung terhadap pencapaian kinerja sasaran sangat signifikan.

Terdapat 4 kegiatan yang capaian kinerja out put kegiatan dibawah 80%, dan anggarannya dialihkan untuk tanggap darurat bencana Gunung Merapi, yaitu Penyusunan laporan periodik tahun 2010, Pengkajian hibah gedung SD, Analisis Hasil Pemeriksaan dan Hasil Pemantauan Pajak Daerah dan Penyediaan surat ketetapan pajak PPJU.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
2. Peningkatan pelayanan dari aparat

#### **Hambatan/masalah:**

Kurangnya SDM dalam program intensifikasi pemungutan PAD khususnya pajak reklame dibandingkan dengan luas wilayah.

#### **Strategi/ upaya pemecahan:**

Kerjasama dengan pihak ke III dalam penanganan pajak reklame.



## Sasaran 5 :

### **”Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah ”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 92,41 dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Keterlibatan publik dalam perencanaan dengan angka capaian kinerja sebesar 100.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik dengan angka capaian kinerja sebesar 84,82.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

1. Keterlibatan publik dalam perencanaan, persentase pencapaian rencana sebesar 129,63% atau terealisasi 116,67% dari Rencana 90%.

Penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Sleman. Proses tersebut diawali dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan melibatkan seluruh SKPD, perwakilan tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi, organisasi profesi swasta dan LSM.

Stakeholder yang diundang pada pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten yaitu:

- SKPD se kabupaten Sleman sejumlah 55 SKPD
- Ketua dan komisi DPRD Kabupaten Sleman
- tokoh masyarakat yang merupakan wakil dari masing-masing kecamatan, yaitu perwakilan BPD, tokoh masyarakat, paguyuban dukuh, paguyuban kepala desa, perwakilan karang taruna yang keseluruhannya berjumlah 15 orang.





- Perwakilan dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang ada di lingkup Kabupaten Sleman, antara lain UGM, UII, UNY, Sanata Dharma, UTY, BPTP, BATAN sejumlah 10 orang.
- Perwakilan dari organisasi profesi, dan organisasi sosial, antara lain IDI, , KONI, PMI, PPCS, K3S, SPSI sejumlah 8 orang
- Perwakilan dari perbankan, pengusaha dan swasta, antara lain: Bank Pembangunan Daerah, Bank Sleman, BRI, KADIN, REI, Gapensi, PHRI, PDAM, APINDO sejumlah 10 orang
- Perwakilan dari instansi vertikal antara lain: PLN, Polres, BPN, Kantor Pos, Telkom, Kantor Depag, sejumlah 10 orang
- Organisasi profesi yang mewakili bidang pertanian (KTNA, Gapoktan), bidang koperasi, industri/UMKM sejumlah 10 orang
- Perwakilan LSM antara lain, Satu Nama, Dian Desa, Riefka Anisa, LP3Y, IDEA, PKBI, sejumlah 10 orang

Keseluruhan peserta yang diundang dalam musrenbang tingkat Kabupaten tahun 2009 berjumlah 150 undangan dan hadir sebanyak 175 undangan/orang atau sebesar 116,67 %.

2. Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, persentase pencapaian rencana sebesar 82,84% atau terealisasi 67,86% dari rencana 80%.

Untuk mengukur keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik menggunakan tolok ukur tingkat kehadiran masyarakat yang dilibatkan oleh DPRD Kabupaten Sleman dalam penyusunan Raperda yang secara langsung mengatur kegiatan masyarakat.

Dari hasil dokumen kehadiran unsur masyarakat dalam penyusunan raperda rata-rata sebesar 67,86% dengan rincian:

- a. Penyusunan Raperda APBD Tahun 2011 melibatkan elemen masyarakat yaitu Paguyuban Cokropamungkas, Paguyuban Suryo Ndadari, Ketua BPD Kecamatan, LSM (Satu Nama, WALHI, Wana Mandiri, IDEA, Ma'arif) dan Tokoh Masyarakat (NU, Muhammadiyah, MUI) dengan tingkat kehadiran sebesar 75%.



- b. Penyusunan Raperda Pajak Air Tanah melibatkan elemen masyarakat yaitu Dir. Ambarukmo, Dir.Hyatt Regency, Forum Komunikasi Hotel dan Restoran, Pengusaha Rumah Makan dan Water Boom Pakemsari, Dir. Quality Hotel, PHRI, Dir.Sahid Raya Hotel dengan tingkat kehadiran sebesar 50%.
- c. Penyusunan Raperda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan melibatkan elemen masyarakat dan Instansi terkait yaitu Perwakilan IPPAT, INI, Paguyuban Camat, DPKKD dengan tingkat kehadiran sebesar 50%.
- d. Penyusunan Raperda Jaminan Kesehatan Daerah melibatkan pihak RSUD Sleman dan RSUD Prambanan dengan tingkat kehadiran sebesar 100%.
- e. Penyusunan Raperda Bangunan Gedung melibatkan Gapensi, Gapeknas dan Gapeksindo dengan tingkat kehadiran sebesar 100%.
- f. Penyusunan Raperda Pajak Hotel melibatkan usaha jasa perhotelan yaitu PHRI DIY, GM. Hotel Hyett Regency, GM.Hotel Pakumas, dengan tingkat kehadiran sebesar 50%.
- g. Penyusunan Raperda Pajak Restoran melibatkan jasa usaha restoran yaitu Mugen Catering, Gudeg Yu Narni, RM Jimbaran, Forum Komunikasi Hotel dan Restoran dengan tingkat kehadiran sebesar 25%.

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik pada tahun 2010 sebesar 67,86% mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun 2009 sebesar 50%.

Pencapaian kinerja dari sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah, dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	2009			2010		
	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja
Keterlibatan publik dalam perencanaan	87,5%	86,67%	99,05	90%	116,67%	100
Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik	77,5%	50%	64,52	80%	67,86%	82,84



Pencapaian sasaran tersebut didukung dengan program utama perencanaan pembangunan daerah dengan 13 Kegiatan dengan realisasi dukungan dana Rp1.691.736.000,00. (88,99%).dari target sebesar Rp1.901.013.000,00; sehingga daya dukung terhadap pencapaian kinerja sasaran sangat signifikan.

**Hambatan/masalah:**

1. Kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pada proses perencanaan masih kurang.
2. Adanya anggapan atau asumsi bahwa dokumen perencanaan kurang mengakomodasi kebutuhan yang sebenarnya dari daerah dan antar daerah.

**Strategi/ upaya pemecahan:**

1. Peningkatan SDM baik masyarakat maupun aparat serta pelibatan lebih banyak unsur-unsur di luar pemerintah seperti tokoh-tokoh masyarakat dan LSM dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan publik;
2. Pelibatan aktif pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan publik.

**Sasaran 6 :**

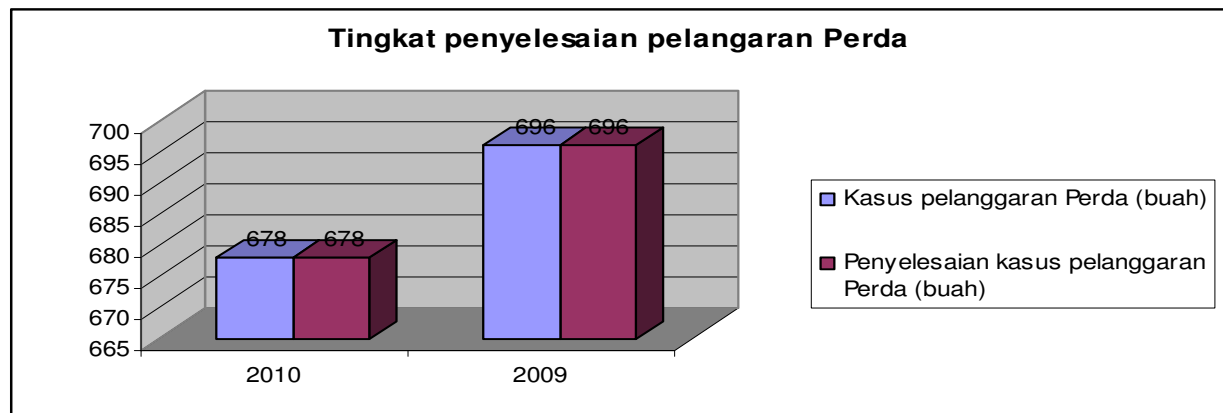
**“Menurunnya kasus pelanggaran hukum ”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran menurunnya kasus pelanggaran hukum dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda; memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100, dengan kategori predikat **Sangat Berhasil**.

Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda, persentase pencapaian rencana sebesar 125% atau terealisasi sebesar 100% dari rencana sebesar 80%.

Keberhasilan sasaran tersebut antara lain terlihat dari capaian tingkat penyelesaian pelanggaran Perda; pada tahun 2010 kasus pelanggaran Perda sebanyak 678 kasus yang telah diselesaikan seluruhnya atau mencapai 100%, dalam tahun 2009 sebanyak 696 kasus yang ada telah dapat diselesaikan seluruhnya atau mencapai 100%.

**Grafik 1. Tingkat Penyelesaian pelanggaran Perda Kabupaten Sleman Tahun 2009 – 2010**



Sasaran tersebut dicapai melalui program :

1. Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum.
2. Pembentukan produk hukum dan HAM.

**Hambatan/masalah :**

1. Kurangnya pemahaman masyarakat atas peraturan yang berlaku.
2. Adanya kepentingan individu/kelompok dari masyarakat sehingga muncul kecenderungan masyarakat untuk melakukan pelanggaran.

**Strategi/upaya pemecahan :**

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui event-event yang melibatkan masyarakat secara langsung maupun media.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui Meningkatkan koordinasi dengan perangkat baik di tingkat desa, kecamatan maupun lintas sektoral.

**Sasaran 7:**

**“Menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 91,50 dengan predikat **Sangat Berhasil**.



Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Kejadian penyakit masyarakat (pekat) dengan angka capaian indikator kinerja sebesar 83,00.
2. Pelayanan penanganan bencana dengan angka capaian indikator kinerja sebesar 100.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kejadian penyakit masyarakat (pekat) tahun 2010 ditargetkan menurun sebesar 5% atau diharapkan bisa menurun 1 kejadian pekat dari tahun 2009 yang mencapai 19 kejadian, sehingga target tahun 2010 kejadian pekat maksimal 18 kejadian; realisasinya kejadian pekat tahun 2010 sebanyak 21 kejadian; dengan demikian capaian indikator kinerjanya sebesar 83,00%.
2. Pelayanan penanganan bencana, persentase pencapaian rencana sebesar 117,65% atau terealisasi sebesar 100% dari rencana sebesar 85%.

Kejadian bencana pada tahun 2010 mencapai 76 kejadian, meliputi kebakaran sebanyak 50 kali, erupsi Gunung Merapi 4 kejadian, banjir lahar dingin 6 kejadian, longsor 2 kejadian dan angin ribut 14 kejadian. Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan penanganan terhadap seluruh kejadian bencana tersebut sebanyak 76 penanganan.

Perbandingan pencapaian indikator kinerja dari tahun 2009 dan tahun 2010 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2009			2010		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Kejadian penyakit masyarakat (Pekat).	5%	3,1%	161,22	5%	5,85%	83,00
Pelayanan penanganan bencana	10%	100%	100	85%	100%	100



Sasaran tersebut dicapai melalui program Peningkatan keamanan dan ketertiban, didukung 11 kegiatan dengan rata-rata capaian indikator out put sebesar 100%.

Dari 11 kegiatan yang dilaksanakan terdapat 2 kegiatan yang capaian kinerja out put dibawah 80% tetapi tidak mempengaruhi terhadap capaian kinerja sasaran, yaitu: kegiatan penyuluhan hukum, capaian kinerjanya 70%; dan kegiatan operasi penertiban, capaian kinerjanya 77%. Rendahnya capaian kinerja kegiatan tersebut karena sebagian anggarannya dialihkan untuk tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp1.327.527.300,00 dan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp1.147.126.867,00 ( 86,41%).

**Hambatan/masalah:**

1. Tingginya angka penduduk masuk ke wilayah Kabupaten Sleman.
2. Terbatasnya SDM yang tersedia dan terbatasnya peralatan yang dibutuhkan untuk penanganan bencana.

**Strategi/ upaya pemecahan:**

1. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat baik di tingkat desa, kecamatan maupun lintas sektoral.
2. Pemanfaatan tenaga relawan penanggulangan bencana baik dari Lembaga Swadaya Masyarakat maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
3. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral antara lain dengan TNI, PMI, Polres Sleman, PLN, dan Organisasi Masyarakat.

**Sasaran 8:**

**“ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik ”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik, dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik; memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 88,34 dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Target sebesar 80% terealisasi sebesar 70,67% sehingga persentase pencapaian rencana sebesar 88,34%.



Pengukuran indikator kinerja tersebut menggunakan data partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) yang dilakukan secara langsung pada tahun 2010; dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 536.531 orang atau 70,67% dari jumlah pemilih tetap sebanyak 759.206 orang. Dengan demikian prosentase capaian kinerjanya sebesar 88,34% dari target sebesar 80%.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan hak berpolitik tidak saja pada PEMILUKADA tahun 2010 tetapi juga terlihat dalam pemilihan langsung yang digelar tahun 2009; untuk Pemilihan Legislatif mencapai 73% dari 784.182 pemilih tetap, dan Pemilihan Presiden mencapai 77% dari 795.129 pemilih tetap.

Partisipasi masyarakat dilihat dalam keikutsertaan sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga cukup tinggi; hal ini terlihat dalam PEMILUKADA Kabupaten Sleman tahun 2010 diikuti oleh 7 pasang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jumlah pasangan peserta PEMILUKADA di Kabupaten Sleman lebih banyak dibandingkan peserta PEMILUKADA lainnya di Propinsi DIY pada tahun 2010, sebanyak 3 pasang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada PEMILUKADA Kabupaten Gunung Kidul dan 2 pasang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada PEMILUKADA Kabupaten Bantul.

Dengan kematangan berdemokrasi dan berpolitik, pelaksanaan PEMILUKADA dengan 7 pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Sleman dapat berlangsung 1 (satu) putaran, selain efektif juga terdapat efisiensi penggunaan dana pemilu.

Sasaran tersebut dicapai melalui program :

1. Pengembangan wawasan kebangsaan.
2. Pengembangan budaya demokratis.

Sasaran ini didukung 12 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja out put kegiatan sebesar 98,72%; dan hanya terdapat 1 kegiatan yang capaian kinerjanya mencapai 70% yaitu kegiatan pendampingan Pilkades, Pilduk dan Pengisian Perangkat Desa, tidak tercapainya kinerja sasaran ini karena sub kegiatan pendampingan pemilihan



Kades, target yang ditetapkan adalah merupakan antisipasi pemilihan untuk perangkat yang berhalangan tetap, dari target 5 orang terealisasi 1 orang (Kades meninggal) atau dengan capaian 20%.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik sebesar Rp2.601.722.500,00 dan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp2.486.282.000,00 ( 95,6%).

**Hambatan/masalah:**

Pemahaman politik masyarakat belum sesuai yang diharapkan sehingga di masyarakat masih ada fenomena golput.

**Strategi/ upaya pemecahan:**

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan partai politik dalam rangka pendidikan politik masyarakat.

**Sasaran 9 :**

**“ Meningkatkan produksi barang dan jasa ”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi barang dan jasa dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 80,26 dengan predikat **Berhasil**.

Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian dengan angka capaian indikator kinerja sebesar 21,05.
2. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor industri pengolahan dengan angka capaian indikator kinerja sebesar 100.
3. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan angka capaian indikator kinerja sebesar 100.
4. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor jasa-jasa dengan angka capaian indikator kinerja sebesar 100.





Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sektor pertanian, persentase pencapaian rencana sebesar 21,05% atau terealisasi 0,80% dari rencana 3,80%.

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sektor pertanian tahun 2010 sebesar 0,80%, lebih rendah apabila dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2009 mencapai sebesar 1,75%.

PDRB sektor pertanian terdiri dari 5 (lima) sub sektor, yaitu :

- a) sub sektor perikanan,
- b) sub sektor perkebunan,
- c) sub sektor kehutanan,
- d) sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya,
- e) sub sektor tanaman bahan makanan.

Dari kelima sub sektor pendukung sektor pertanian yang nampak menonjol dengan pertumbuhan yang cukup signifikan adalah sub sektor perikanan dengan pertumbuhan sebesar 11,55%; sedang keempat sub sektor lainnya pertumbuhannya rendah, dengan rincian pertumbuhan sebesar 2,57% untuk sub sektor perkebunan, pertumbuhan sebesar 1,76% untuk sub sektor kehutanan, pertumbuhan sebesar 0,64% untuk sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya, dan terjadi penurunan sebesar 0,10% untuk sub sektor tanaman bahan makanan.

Pertumbuhan yang relatif kecil pada sub sektor kehutanan, peternakan dan hasil-hasilnya, serta pertumbuhan negatif pada sub sektor tanaman bahan makanan disebabkan perubahan iklim yang sulit diprediksi (curah hujan yang berlebih pada awal hingga pertengahan tahun 2010), serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) terutama tikus dan wereng coklat, menyebabkan produksi dan produktivitas pertanian menurun. Hal ini juga diperparah adanya erupsi Gunung Merapi diakhir tahun 2010 mengakibatkan rusaknya kawasan pertanian salak pondoh, perkebunan kopi, kelapa serta kawasan hutan rakyat di lereng Gunung Merapi.



2. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sektor industri pengolahan tahun 2010 sebesar 2,08%; pertumbuhan ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2009 sebesar 1,93% dan melampaui target tahun 2010 sebesar 1,90%.

PDRB sektor industri pengolahan pada tahun 2010 didukung 8 (delapan) sub sektor tanpa migas, yaitu:

- a) sub sektor makanan, minuman dan tembakau,
- b) sub sektor tekstil, barang kulit dan alas kaki,
- c) sub sektor barang kayu dan hasil hutan lainnya.
- d) sub sektor kertas dan barang cetakan,
- e) sub sektor pupuk, kimia dan barang dari karet,
- f) sub sektor semen dan barang galian bukan logam,
- g) sub sektor alat angkutan, mesin dan peralatannya,
- h) sub sektor barang lainnya.

Secara umum laju pertumbuhan sektor industri pengolahan tumbuh signifikan, tetapi perlu adanya kewaspadaan dengan membanjirnya produk pakaian dan tekstil dari China.

3. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2010 sebesar 5,14%, pertumbuhan ini lebih rendah apabila dibandingkan pertumbuhan tahun 2009 yang mencapai 6,48%. tetapi meskipun begitu pertumbuhan tahun 2010 ini melampaui target sasaran yang ditetapkan sebesar 5%.

PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran di dukung 3 (tiga) sub sektor :

- a) sub sektor perdagangan,
- b) sub sektor hotel.
- c) sub sektor restoran.

Secara umum laju pertumbuhan sektor perdagangan dan restoran mengalami kenaikan, tetapi sub sektor hotel mengalami penurunan sebesar 4,79%, penurunan ini lebih disebabkan adanya erupsi Gunung Merapi yang



mengakibatkan angka kunjungan wisata ke Jogjakarta dan Kabupaten Sleman menurun, sehingga hunian hotel sangat sepi.

4. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sektor jasa-jasa pada tahun 2010 sebesar 4,33%, pertumbuhan ini sedikit lebih rendah apabila dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2009 yang mencapai 4,44%, akan tetapi pertumbuhan ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,10%.

PDRB sektor jasa-jasa meliputi 2 (dua) sub sektor, yaitu :

- a) sub sektor pemerintahan umum,
- b) sub sektor swasta.

Dukungan keberhasilan sektor jasa-jasa dari sub sektor swasta terutama pada berhasilnya pengembangan di bidang hiburan dan rekreasi.

Perbandingan pencapaian indikator kinerja dari tahun 2009 dan tahun 2010 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2009			2010		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian	3,70	2,16	58,34	3,80	0,80	21,05
Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor industri	4,50	1,80	40,00	1,90	2,08	100
Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagangan, hotel dan restoran.	-	-	-	5,00	5,14	100
Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor jasa-jasa.	-	-	-	3,10	4,33	100

Sasaran tersebut dicapai melalui Program:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
2. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Teknologi Petani..
3. Program Pengembangan Agribisnis.
4. Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif Bagi UMKM..



5. Program Pengembangan Usaha Kecil dan UMKM.
6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM.
7. Program Peningkatan Kemampuan Rekayasa dan Pemanfaatan Teknologi dalam Industri.
8. Program Pengembangan obyek dan daya tarik wisata.

Sasaran ini didukung dengan 56 kegiatan dengan capaian kinerja out put kegiatan rata-rata sebesar 86,69%, dari 56 kegiatan terdapat 1 kegiatan yang tidak terlaksana yaitu fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM; dan anggarannya dialihkan untuk tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi.

Dukungan dana sebesar Rp8.522.364.590,00 ( 86,66%) dari anggaran sebesar Rp9.845.952.950,00; sehingga sangat signifikan terhadap pencapaian kinerja sasaran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran yaitu:

Tingginya peran serta masyarakat untuk memperbaiki mutu produksi baik secara kualitas maupun kuantitas dalam pengembangan perekonomian dengan mengutamakan pemakaian bahan baku lokal berbasis sentra dan didukung cukup kondusifnya serapan pasar serta keamanan di wilayah Kabupaten Sleman.

**Hambatan/masalah:**

1. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali akan menyebabkan semakin menurunnya produksi komoditas pertanian.
2. Tingginya fluktuasi harga produk pertanian menyebabkan petani seringkali merugi karena biaya produksi tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.
3. Semakin kuatnya persaingan produk pada pasar global, khususnya membanjirnya produk China dan Taiwan.

**Strategi/ upaya pemecahan:**

1. Memberikan insentif berupa subsidi pembayaran PBB khusus untuk kawasan pertanian beririgasi teknis yang produktif dan pemberian bantuan alat produksi pertanian.



2. Peningkatan kualitas kelembagaan petani dalam melakukan perencanaan pola tanam dan menjalin kemitraan dengan pihak lain dalam pemasaran hasil produksi pertanian.
3. Pelatihan dan penumbuhan motivasi pengusaha kecil/menengah dalam membenahan manajemen usaha sehingga lebih efisien dalam proses produksi dan melakukan inovasi produk sehingga lebih mampu bersaing dengan produk import.
4. Fasilitas pemasaran melalui berbagai event pameran baik yang bersifat lokal, regional maupun internasional.

#### **Sasaran 10:**

#### **“Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perhubungan”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas prasarana dan sarana perhubungan dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 92,18 dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Prasarana perhubungan dengan kondisi baik, dengan angka capaian indikator kinerja sebesar 76,54.
2. Sarana perhubungan dengan kondisi baik, dengan angka capaian indikator kinerja sebesar 100.
3. Penambahan prasarana dan sarana perhubungan, dengan angka capaian kinerja 100.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

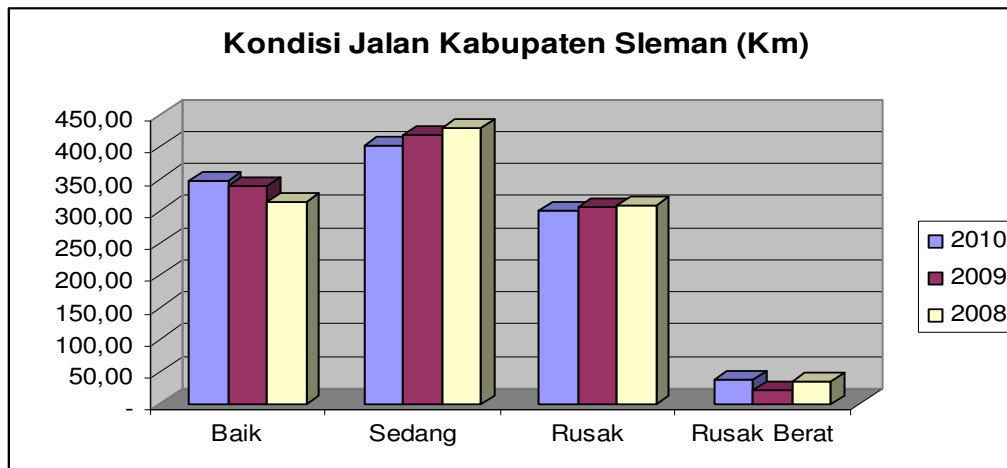
1. Prasarana perhubungan dengan kondisi baik, persentase pencapaian rencana sebesar 76,54% atau terealisasi 47,65% dari rencana 62,25%.

Pengukuran indikator tersebut dilakukan terhadap kondisi fisik dari jalan dan jembatan Kabupaten dengan hasil sebagai berikut:



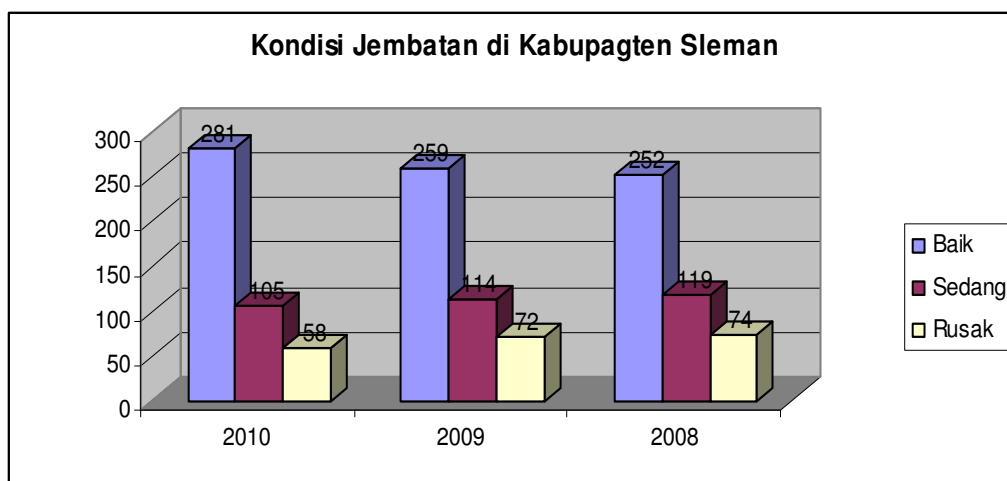
- a. Panjang ruas jalan Kabupaten 1.085,13 km, pada tahun 2010 jalan dengan kondisi baik sepanjang 346,33 km atau 31,92%, meningkat dibandingkan tahun 2009 sepanjang 339,63 km dan tahun 2008 sepanjang 314,33 km.

**Grafik 2. Kondisi Jalan Kabupaten Sleman Tahun 2010**



- b. Jumlah jembatan Kabupaten sebanyak 445 buah, pada tahun 2010 jembatan dengan kondisi baik sebanyak 281 buah atau 63,37% meningkat dibandingkan tahun 2009 sebanyak 259 buah dan tahun 2008 sebanyak 252 buah.

**Grafik 3. Kondisi Jembatan Kabupaten Sleman Tahun 2008 - 2010**



2. Sarana perhubungan dengan kondisi baik, persentase pencapaian rencana sebesar 158,88% atau terealisasi 100% dari rencana sebesar 62,94%.

Pengukuran indikator tersebut dilakukan terhadap kondisi fisik dari rambu-rambu lalu lintas yang terdapat di wilayah Kabupaten Sleman, pada tahun 2010 jumlah



rambu-rambu lalu lintas sebanyak 1.675 buah, dengan kondisi baik sebanyak 1.675 buah atau sebesar 100%.

3. Penambahan prasarana dan sarana perhubungan, persentase pencapaian rencana sebesar 3.186% atau terealisasi 101,32% dari rencana 3,18%.

Pengukuran indikator tersebut hanya dilakukan terhadap penambahan sarana perhubungan, karena pada tahun 2010 tidak terdapat penambahan prasarana perhubungan berupa ruas jalan Kabupaten maupun jembatan Kabupaten.

Peningkatan jumlah rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Sleman sangat tinggi, jumlah rambu-rambu lalu lintas pada tahun 2008 sebanyak 737 buah, pada tahun 2009 sebanyak 832 buah (meningkat 10,34%) dan tahun 2010 meningkat menjadi 1.675 buah (meningkat 101,32%). Tingginya penambahan sarana perhubungan ini dalam rangka penanggulangan bencana.

Perbandingan pencapaian indikator kinerja dari tahun 2009 dan tahun 2010 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2009			2010		
	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja
Prasarana perhubungan dengan kondisi baik	47,50	44,75	94,21	62,25	66,14	100
Sarana perhubungan dengan kondisi baik	76	76	100	62,94	100	100
Penambahan prasarana dan sarana perhubungan	-	10,34	-	3,18	101,32	100

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) program utama yaitu:

1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
2. Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas.
3. Peningkatan manajemen lalulintas.



Sasaran ini didukung 16 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja out put kegiatan sebesar 100%; sehingga sangat signifikan terhadap keberhasilan pencapaian kinerja sasaran.

Untuk mencapai sasaran ini didukung dana sebesar Rp27.439.910.945,00 (89,5%) dari anggaran sebesar Rp30.653.248.000,00; sehingga terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas prasarana dan sarana perhubungan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui swadaya.
2. Pemberian stimulan dari pemerintah untuk pembangunan jalan, gorong-gorong dan jembatan.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana perhubungan yang ada.

**Hambatan/masalah:**

1. Laju kerusakan jalan tidak sebanding dengan kemampuan anggaran untuk pemeliharaan secara berkala.
2. Keterbatasan prasarana khususnya alat berat untuk menunjang swadaya masyarakat yang cukup besar dalam pembangunan jalan.
3. Perilaku dan pemahaman masyarakat terhadap perlunya turut serta menjaga fisik jalan beserta fungsi – fungsinya masih kurang.

**Strategi/ upaya pemecahan:**

1. Mengajukan usulan ke Pemerintah Pusat untuk pembangunan jalan, jembatan dan gorong-gorong.
2. Pengadaan alat berat untuk pembangunan peningkatan jalan secara bertahap.
3. Penyuluhan akan pentingnya peran serta masyarakat dalam memelihara jalan dan jembatan.





## Sasaran 11:

### ”Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pengairan”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pengairan dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 85,13 dengan **Sangat Berhasil**.

Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Bendung dengan kondisi baik dengan angka capaian kinerja sebesar 95,94.
2. Saluran irigasi dengan kondisi baik dengan angka capaian kinerja sebesar 99,46.
3. Jaringan irigasi air tanah dengan kondisi baik dengan angka capaian kinerja sebesar 60,00.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bendung dengan kondisi baik, persentase pencapaian rencana sebesar 95,94 % atau terealisasi 74,06 % dari rencana sebesar 77,19 %.

Jumlah bendungan di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 sebanyak 2.082 buah terdiri dari bendung teknis 954 buah, semi teknis 205 buah, dan bendung sederhana 923 buah. Kondisi bendung yang baik pasca erupsi Gunung Merapi sebanyak 1.542 bendungan atau 74,06%. Capaian tersebut mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2009 sebanyak 1.586 buah (76,18%) tetapi lebih baik dibandingkan tahun 2008 sebanyak 861 buah (41,35%).

2. Saluran irigasi dengan kondisi baik, persentase pencapaian rencana sebesar 99,46% atau terealisasi 72,01% dari rencana sebesar 72,40%.

Panjang saluran irigasi di Kabupaten Sleman Tahun 2010 sepanjang 2.729,10 km terdiri dari saluran irigasi primer 346,81 km, saluran irigasi sekunder 421,39 km dan saluran irigasi tersier 1.960,89 km.

Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap saluran irigasi primer dan saluran irigasi sekunder, sedangkan saluran irigasi tersier yang merupakan saluran irigasi pertanian, pemeliharaannya dilaksanakan oleh masyarakat melalui Perkumpulan Pemakai Air (PPA). Dengan demikian kondisi



saluran irigasi yang dapat diidentifikasi yaitu saluran irigasi primer dan saluran irigasi sekunder.

Kondisi saluran primer dan sekunder yang kondisinya baik tahun 2010 sebesar 72,01%; meningkat dibandingkan tahun 2009 sebesar 70,90% dan menurun dibandingkan tahun 2008 sebesar 80,36%, seperti pada tabel di bawah ini:

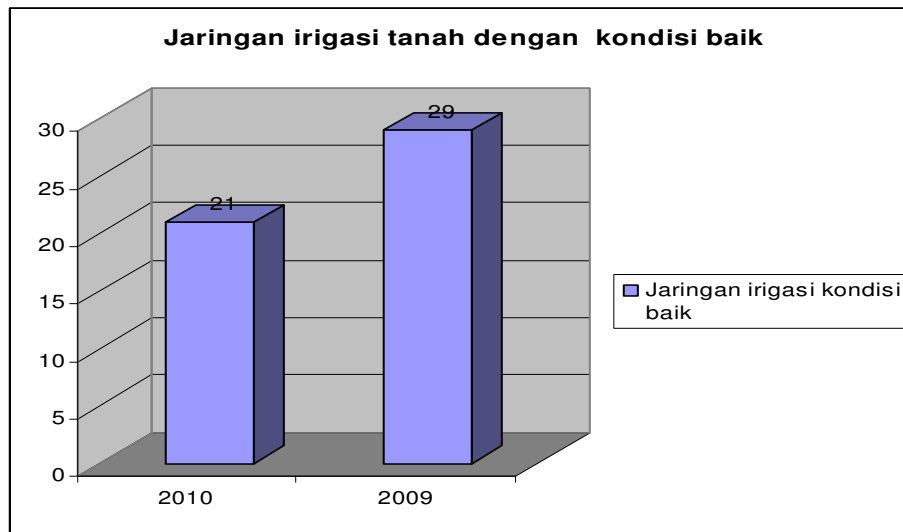
**Tabel 9 Saluran Irigasi Primer dan Sekunder Kondisi Baik Tahun 2008-2010**

No	Uraian	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Saluran Irigasi Primer (km)	257,48	247,00	249,568
2	Saluran Irigasi Sekunder (km)	299,49	297,62	303,613
	Jumlah (km)	556,97	554,62	553,18

3. Jaringan irigasi air tanah dengan kondisi baik, persentase pencapaian rencana sebesar 60% atau terealisasi 46,67 % dari rencana 77,78 %.

Jumlah jaringan irigasi air tanah di Kabupaten Sleman seluruhnya sebanyak 45 buah dan yang kondisinya baik sebanyak 21 buah jaringan atau sebesar 46,66%. Realisasi tersebut mengalami sedikit penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2009 sebanyak 29 buah. Kondisi ini antara lain disebabkan pasca bencana erupsi gunung merapi dilanjutkan bencana lahar dingin banyaknya jaringan air tanah yang mengalami kerusakan; dan kegiatan pemeliharaan jaringan air tanah di Kecamatan Cangkringan dan Pakem pasca erupsi gunung merapi ditanggungkan sampai kondisi memungkinkan.

**Grafik 4. Jaringan Irigasi Air Tanah Kabupaten Sleman Tahun 2009 – 2010**



Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2009			2010		
		Rencana (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Rencana (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
1	Bendung dengan kondisi baik	53	76.18	143.74	77.19	74.06	95.94
2	Saluran irigasi dengan kondisi baik	78	70.90	90.90	72.40	72.01	99.46
3	Jaringan irigasi tanah dengan kondisi baik	80	64,44	80,55	77.78	46.67	60.00

Sasaran Peningkatan prasarana dan sarana pengairan dicapai melalui program utama Peningkatan, pemeliharaan prasarana dan sarana pengairan dengan 7 kegiatan; capaian rata-rata indikator kinerja out put sebesar 98,91% dengan realisasi dukungan dana Rp7.271.743.000,00 atau (93,17%) dari target sebesar Rp7.804.800.000,00; sehingga daya dukung terhadap pencapaian kinerja sasaran sangat signifikan.



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran peningkatan prasarana dan sarana pengairan sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan dengan swadaya.
2. Pemberdayaan masyarakat pengguna sarana dan prasarana pengairan secara berkelanjutan
3. Dukungan dana pusat melalui DAK ( Dana Alokasi Khusus ) porsinya ditambah untuk operasi dan pemeliharaan irigasi.
4. Kerjasama antara Pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan asset irigasi.
5. Kerjasama didalam pelaksanaan konstruksi antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Perkumpulan Pemakai Air ( PPA ) merupakan nilai tambah didalam kualitas maupun kesesuaian sasaran.

**Hambatan/masalah:**

1. Alokasi anggaran ( APBD ) yang sangat terbatas sehingga kerusakan bangunan irigasi tidak dapat segera diperbaiki pada tahun yang sama, hal ini menyebabkan akumulasi kerusakan untuk tahun mendatang dilihat dari kerusakan dan realisasi perbaikan maka kemampuan APBD baru 20% untuk perbaikannya. Artinya butuh waktu 5 tahun untuk dapat memperbaiki keseluruhannya bangunan irigasi.
2. Pelanggaran atas aturan penutupan saluran maupun sempadan saluran berakibat sering terjadinya kerusakan akibat perubahan dimensi bangunan dan kesulitan didalam pemeliharanya.
3. Terjadinya banjir lahar dingin akibat erupsi gunung merapi menyebabkan beberapa kegiatan pembangunan tidak dapat dilaksanakan, selain itu bendung dan saluran irigasi banyak yang mengalami kerusakan karena terkena terjangan material vulkanik.

**Strategi pemecahan masalah:**

1. Memberikan porsi dana yang cukup untuk operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan.



2. Peningkatan kerja sama pengelolaan irigasi dengan PPA atau gabungan PPA.
3. Untuk bendung dan saluran yang tertimbun lahar dingin dilakukan pengerukan sedimen sedangkan saluran yang rusak/putus dilakukan pemasangan pipa pralon agar air irigasi dapat mengalir.

## **Sasaran 12 :**

### **"Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman"**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 84,22 dengan predikat **Berhasil**.

Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman dalam kondisi baik dengan angka capaian kinerja sebesar 68,44.
2. Penambahan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dengan angka capaian kinerja sebesar 100.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

1. Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman dalam kondisi baik, persentase pencapaian rencana sebesar 69,84% atau terrealisasi 47,8% dari rencana 68,44%.

Pengukuran indikator tersebut dilaksanakan atas kondisi panjang jalan poros, pada tahun 2010 jalan poros desa yang kondisinya baik sepanjang 978,18 km (47,8%) dari panjang jalan poros desa sepanjang 2.046,41 km, mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 2009 sepanjang 1.221,03 km (59,67%).

2. Penambahan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, persentase pencapaian rencana sebesar 3.055% atau terealisasi sebesar 11% dari target sebesar 0,36%.



Pengukuran indikator tersebut dilaksanakan atas peningkatan jalan poros desa, target peningkatan jalan poros desa tahun 2010 sebesar 0,36% atau sepanjang 7,36 km dari panjang jalan poros desa tahun 2009 sepanjang 2.046,41 km. Realisasinya peningkatan jalan poros desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sepanjang 3,26 km dan peningkatan secara swadaya masyarakat sepanjang 224 km, sehingga total peningkatan jalan poros desa mencapai 227,26 km atau sebesar 11%.

Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan realisasi capaian kerjanya sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	2009			2010		
		Renana (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Rencana (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
1.	Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	67	59,67	89,06	68,44	47,8	69,84
2.	Penambahan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	0,36	0,35	97	0,36	11	100

Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman dicapai melalui program utama sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman.
2. Peningkatan prasarana dan sarana fasilitas umum.

Dari 2 proram utama tersebut didukung 6 kegiatan, capaian rata-rata indikator kinerja out put sebear 98,83% dengan realisasi dukungan dana Rp12.450.287.972,00 atau (91,83%). dari target sebesar Rp13.558.246.000,00; sehingga daya dukung terhadap pencapaian kinerja sasaran sangat signifikan.



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sistem/aturan dengan memanfaatkan lembaga pendidikan baik swasta maupun pemerintah.
2. Optimalisasi organisasi dalam penyelenggaraan pembangunan yang partisipatif.
3. Peningkatan pelayanan umum dan pelayanan perizinan.
4. Optimalisasi teknologi untuk meningkatkan pengelolaan prasarana dan sarana perumahan, permukiman, prasarana dan sarana wilayah dan perhubungan.

**Hambatan/masalah:**

Secara kuantitas dan kualitas peralatan yang dimiliki oleh Dinas maupun unit kerja belum dapat mencukupi untuk pelayanan pada standart yang minimal sekalipun.

**Strategi upaya pemecahan:**

Memelihara peralatan yang ada dan meng up-gradenya, serta menambah peralatan sesuai prioritas.

**Sasaran 13 :**

**"Meningkatnya kualitas lingkungan hidup"**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup , dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Kualitas air badan air memenuhi baku mutu dengan angka capaian kinerja kinerja sebesar 100.
2. Penanganan kasus lingkungan hidup dengan angka capaian kinerja kinerja sebesar 100.
3. Rasio sampah terkelola dengan angka capaian kinerja kinerja sebesar 100.



Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kualitas air badan air memenuhi baku mutu, persentase pencapaian rencana sebesar 100% atau terealisasi sebesar 58% dari rencana sebesar 58%.

Dalam mengukur indikator kinerja kualitas air badan air memenuhi baku mutu dilakukan dengan melaksanakan pengujian kualitas air badan air di 3 (tiga) sungai, yaitu Sungai Gajahwong, Sungai Code dan Sungai Winongo dengan lokasi pemeriksaan sebanyak 60 lokasi.

Pemeriksaan kualitas air badan air dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Balai Teknik Kajian Lingkungan Yogyakarta. Hasil pemeriksaan atas kualitas air badan dari hulu sampai hilir termasuk anak sungai menunjukkan 35 lokasi pemeriksaan memiliki kualitas air badan air yang memenuhi baku mutu sedangkan sisanya sebanyak 25 lokasi pemeriksaan tidak memenuhi baku mutu karena sudah tercemar oleh limbah aktivitas kegiatan dan rumah tangga.

2. Penanganan kasus lingkungan hidup, persentase pencapaian rencana sebesar 100% atau terealisasi sebesar 100% dari rencana sebesar 100%.

Pada tahun 2010 terdapat 32 kasus/pengaduan lingkungan, yang terdiri dari kasus/pengaduan pencemaran tanah sebanyak 6 kasus, pencemaran udara sebanyak 19 kasus, dan pencemaran air sebanyak 7 kasus.

Jumlah kasus yang diselesaikan secara musyawarah melalui koordinasi antara masyarakat setempat, Dukuh, Desa, Kecamatan dan Instansi Teknis yang terkait sebanyak 28 kasus. Sedangkan kasus yang lain sebanyak 4 kasus telah dapat diselesaikan sendiri secara musyawarah di tingkat Padukuhan dan Desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan lingkungan sudah semakin baik, juga semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam upaya menciptakan dan memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

3. Rasio sampah terkelola, persentase pencapaian rencana sebesar 100% atau terealisasi sebesar 96,5% dari rencana sebesar 96,50%.

Pengelolaan sampah selain dilaksanakan oleh Pemerintah melalui: pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), daur ulang (dekomposting) dan digunakan kembali (reuse) juga dilaksanakan oleh





masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat tinggi, hal ini terlihat dari perkembangan kelembagaan pengelolaan sampah mandiri di tingkat padukuhan; sampai tahun 2010 telah terdapat kelembagaan sampah mandiri sebanyak 58 lembaga, meningkat 9,6% dari tahun 2009 sebanyak 52 lembaga.

Pengukuran indikator tersebut dengan cara membandingkan sampah yang dihasilkan rumah tangga dengan sampah yang dapat dikelola melalui berbagai upaya pengelolaan seperti tersebut diatas.

Prakiraan penghitungan rata-rata volume sampah yang dihasilkan per rumah tangga per harinya sebanyak 13,75 liter/hari; pada tahun 2010 jumlah rumah tangga di Kabupaten Sleman sebanyak 232.519 keluarga, sehingga sampah rumah tangga seluruhnya mencapai 3.197.136,25 liter/hari atau 3.197,136 m<sup>3</sup>/hari.

Realisasi pengelolaan sampah sebagai berikut:

1. Pengolahan sampah oleh petugas sebanyak 300,50 m<sup>3</sup>/hari atau sebesar 9,5% dengan rincian: pengangkutan oleh petugas ke TPA sebanyak 220 m<sup>3</sup>/hari, didaur ulang/dekomp osting sebanyak 41,80 m<sup>3</sup>/hari, digunakan kembali atau *reuse* sebanyak 38,70 m<sup>3</sup>/hari.
2. Sampah yang dibuang liar dan tidak dapat terkelola oleh petugas kurang lebih sebesar 3,5%, dan
3. Sisanya kurang lebih sebanyak 87% sampah dikelola masyarakat.

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dicapai melalui program utama Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan 22 kegiatan. Capaian rata-rata indikator kinerja out put sebesar 98,83% dengan realisasi dukungan dana Rp3.341.809.049,00 atau (83,17%) dari target sebesar Rp4.017.963.000,00; sehingga daya dukung terhadap pencapaian kinerja sasaran sangat signifikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah secara swadaya dengan cara penimbunan, dan sebagainya.



2. Meningkatnya kesadaran pengusaha untuk mengelola UKL/UPL dan dokumen pengelolaan lingkungan (DPL) yang telah disahkan.
3. Pemeliharaan sepadan sungai baik oleh pemerintah maupun masyarakat..

**Hambatan:**

1. Pemrakarsa/pengusaha kurang melengkapi sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.
2. Penegakan hukum yang belum maksimal.

**Pemecahan masalah:**

1. Bimbingan teknis kepada para pengusaha tentang pengelolaan lingkungan untuk semua jenis kegiatan.
2. Sosialisasi tentang Peraturan perundangan Bidang Lingkungan pada seluruh lapisan masyarakat.

**Sasaran 14 :**

**“Meningkatnya Kualitas Pendidikan”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 95.03 dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Angka melek huruf dengan angka capaian kinerja sebesar 100.
2. Rata-rata lama sekolah dengan angka capaian kinerja sebesar 99,79.
3. Kualifikasi tenaga kependidikan dengan angka capaian kinerja sebesar 84,50.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

1. Angka melek huruf, persentase pencapaian rencana sebesar 100,88% atau terealisasi 95,46 % dari rencana sebesar 94,63% .



Angka melek huruf di Kabupaten Sleman tahun 2010 mencapai 95,46%, capaian tersebut terus meningkat dibandingkan capaian tahun 2009 sebesar 93,04%, tahun 2008 sebesar 93,81%, dan tahun 2007 sebesar 92,17%. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan angka melek huruf tingkat Propinsi DIY sebesar 89,46%.

2. Rata-rata lama sekolah, persentase pencapaian rencana sebesar 99,79 % atau terealisasi 10,18 tahun dari rencana 10,10 tahun.

Rata-rata lama sekolah tahun 2006, 2007 dan 2008 sama sebesar 10,10 tahun, kemudian meningkat pada tahun 2009 dan 2010 sebesar 10,18 tahun. Bila dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah tingkat Propinsi DIY sebesar 8,71 tahun rata - rata lama sekolah di Kabupaten Sleman relatif lebih tinggi.

3. Kualifikasi tenaga kependidikan, persentase pencapaian rencana sebesar 84,50% atau terealisasi sebesar 72,10% dari rencana sebesar 79,79%.

Pengukuran indikator kualifikasi tenaga kependidikan sejak tahun 2009 dengan mengukur kualifikasi guru pendidikan minimal S1/DIV, sedangkan pengukuran sebelum tahun 2009 dengan minimal pendidikan DII.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV pada tahun 2009 sebesar 67,3% dan meningkat pada tahun 2010 menjadi 72,10%.

Selain ketiga indikator kinerja tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sleman juga melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja lainnya sesuai dengan pengukuran kinerja pembangunan pendidikan secara nasional.

Bila dibandingkan dengan target capaian tingkat nasional, maka sebagian besar capaian indikator peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Sleman mampu target capaian tingkat nasional seperti dibawah ini:



**Tabel 10 Capaian Indikator Pembangunan Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2007-2010.**

No	Indikator	Capaian Sleman				Target Capaian Nasional 2010
		2007	2008	2009	2010	
1	Angka Melek Huruf	91,49	91,82	93,04	95,45	94,60
2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	115,34	115,67	116,40	116,42	117,20
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	114,99	115,01	115,87	115,48	99,30
	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA	75,04	75,45	75,73	77,17	61,80
3	Angka Partisipasi Murni SD/MI	98,78	98,99	99,16	100,73	95,20
	Angka Partisipasi Murni SMP/MT	80,77	80,98	81,00	81,71	74,00
4	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,04	0,05	0,04	0,04	0,7
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,04	0,02	0,01	0,01	1,00

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman

Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	2009			2010		
	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja
Angka melek huruf (%)	93,81	93,04	99,18	94,63	95,46	100
Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,18	10,18	100	10,20	10,18	99,8
Kualifikasi tenaga kependidikan (%)	-	-	-	79,79	72,10	84,50



Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan dicapai melalui program utama sebagai berikut:

1. Program kualitas pendidikan dasar dan menengah.
2. Program kualitas pendidikan non formal.
3. Program penelitian dan pengembangan pendidikan.
4. Program peningkatan manajemen pendidikan.

Dari 4 program utama tersebut didukung dengan 22 kegiatan, capaian rata-rata indikator kinerja out put sebesar 100% dengan realisasi dukungan dana Rp92.348.052.414,00 atau (79,63%) dari target sebesar Rp115.966.810.065,00; sehingga daya dukung terhadap pencapaian kinerja sasaran sangat signifikan.

Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan :

1. Adanya kegiatan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) jenjang SD dan SMP negeri dan swasta
2. Adanya kegiatan jaminan pendidikan untuk siswa keluarga miskin pada jenjang SMA dan SMK
3. Kesadaran tenaga pendidik untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan S1 atau D4.
4. Adanya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi di provinsi DIY dalam bidang pengembangan kualitas belajar mengajar dan peningkatan kualifikasi pendidik.
5. Penerapan dalam pengelolaan sekolah dengan pendekatan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS);
6. Adanya bantuan imbal swadaya rehab gedung dan Dana Alokasi Khusus;
7. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekolah khususnya pada jenjang SMA/SMK cukup tinggi.

**Hambatan/masalah:**

1. Masih terdapat anak-anak yang putus sekolah pada jenjang SD/MI 34 orang, SMP/MTs 48 orang, SMA/SMK/MA 51 orang



2. Masih terdapat pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi S1/DIV untuk SD 52,01%, SMP 20,82%, SMA/SMK 11,58%

**Strategi/ upaya pemecahan:**

1. Pengadaan berbagai program kegiatan yaitu menarik warga masyarakat yang putus sekolah untuk mengikuti Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA dan menyediakan dana rawan putus sekolah bagi anak-anak rawan putus sekolah
2. Melakukan kerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma dan Universitas Terbuka dan meningkatkan subsidi siswa sekolah lanjut S1/DIV

**Sasaran 15 :**

**“Meningkatnya Derajat Kesehatan“**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 72,8% dengan kategori predikat **Cukup Berhasil**.

Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Usia harapan hidup dengan angka capaian kinerja sebesar 99,91.
2. Angka kematian bayi (AKB) dengan angka capaian kinerja sebesar 100.
3. Angka kematian ibu melahirkan (AKI) dengan angka capaian kinerja sebesar 38,10.
4. Balita dengan gizi buruk dengan angka capaian kinerja sebesar 53,33.

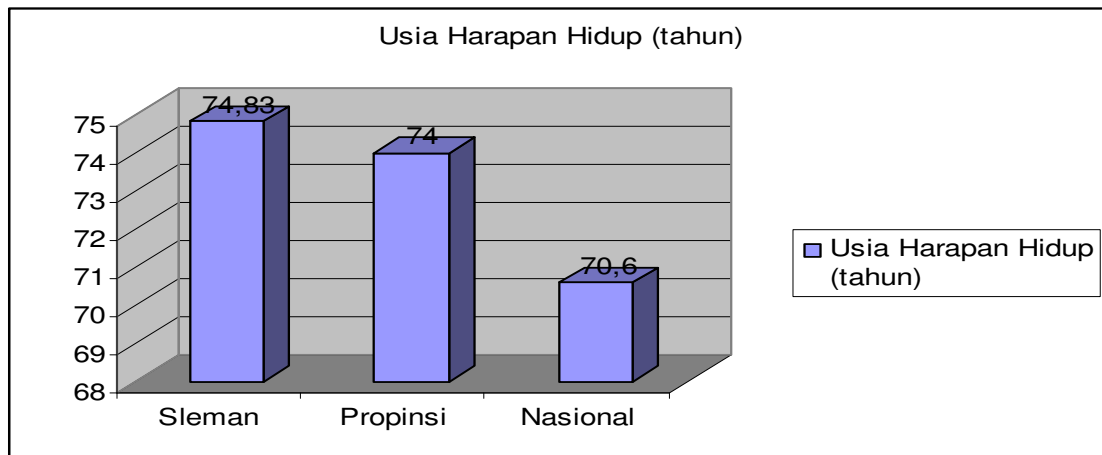
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

1. Usia harapan hidup, persentase pencapaian rencana sebesar 99,91% atau terealisasi 74,83 tahun dari rencana 74,90 tahun.

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Sleman mencapai 74,83 tahun lebih tinggi bila dibandingkan UHH tingkat propinsi DIY 74 tahun ataupun tingkat nasional 70,60 tahun. Usia harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki yakni 76,70 tahun sedangkan laki-laki 73,04 tahun.

## Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sleman, Propinsi DIY dan Nasional

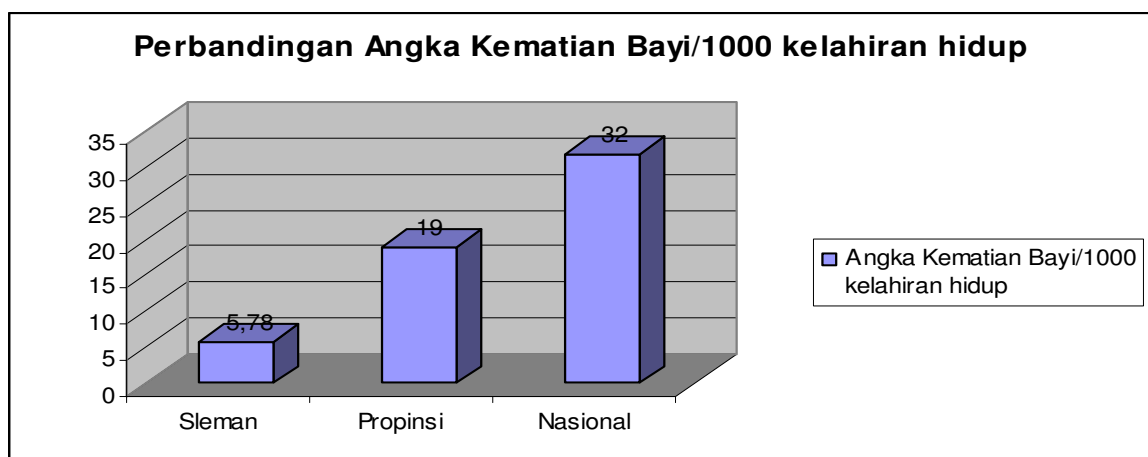
**Grafik 5 Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sleman, Propinsi DIY, Nasional Tahun 2010 .**



- Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, persentase pencapaian rencana sebesar 124,25% atau terealisasi 5,78 per 1.000 kelahiran hidup, dari rencana 7,63 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Sleman dapat dipertahankan dibawah 7,63 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup yaitu tahun 2008 sebesar 5,81; tahun 2009 sebesar 4,08 dan tahun 2010 sebesar 5,78. Angka tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan dengan AKB Propinsi DIY sebesar 19 perseribu kelahiran hidup ataupun di tingkat nasional sebesar 32 perseribu kelahiran hidup.

**Grafik 6 Perbandingan Angka Kematian Bayi Kabupaten Sleman, Propinsi DIY, Nasional Tahun 2010.**

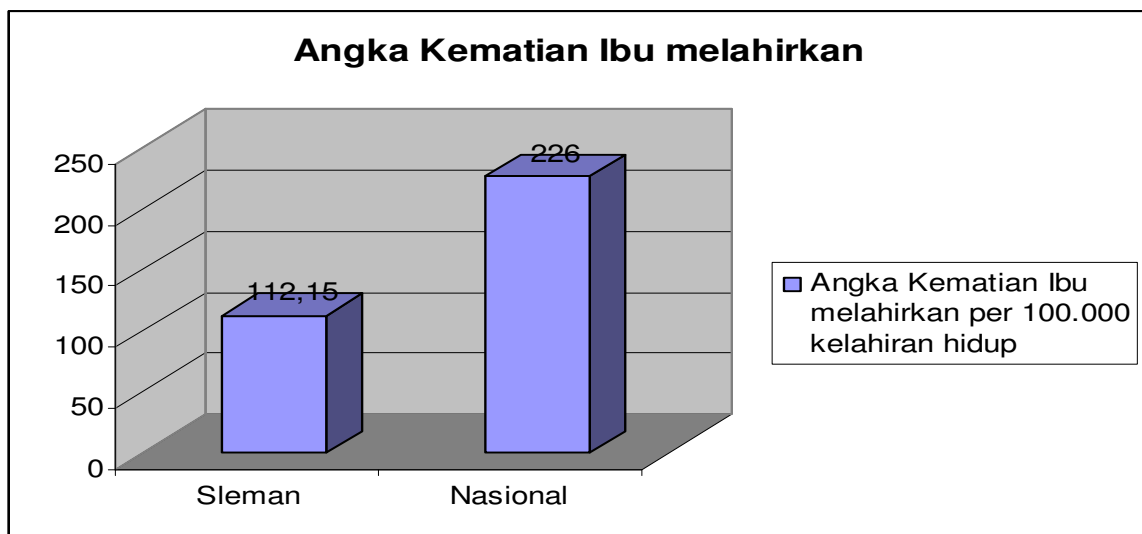


3. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (AKI), persentase pencapaian rencana sebesar 38,10% atau terealisasi 112,15 per 100.000 kelahiran hidup dari rencana 69,27 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup tahun 2010 sebesar 112,15. Adapun sebab kematian ibu melahirkan antara lain yaitu perdarahan post partum, eklamsi dan kematian disertai komplikasi maupun beban psikologis ibu melahirkan korban Merapi (terdapat 3 orang ibu melahirkan yang meninggal di pengungsian).

Meskipun capaian kinerja Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dalam kategori tidak berhasil, namun jika dibandingkan tingkat nasional sebesar 226 per 100.000 kelahiran hidup, maka Angka Kematian Ibu melahirkan Kabupaten Sleman masih lebih baik.

**Grafik 7 Perbandingan Kematian Ibu Melahirkan Kabupaten Sleman, Nasional Tahun 2010 .**



4. Balita dengan gizi buruk, persentase pencapaian rencana sebesar 53,33% atau terealisasi sebesar 0,66% dari rencana sebesar 0,45%.

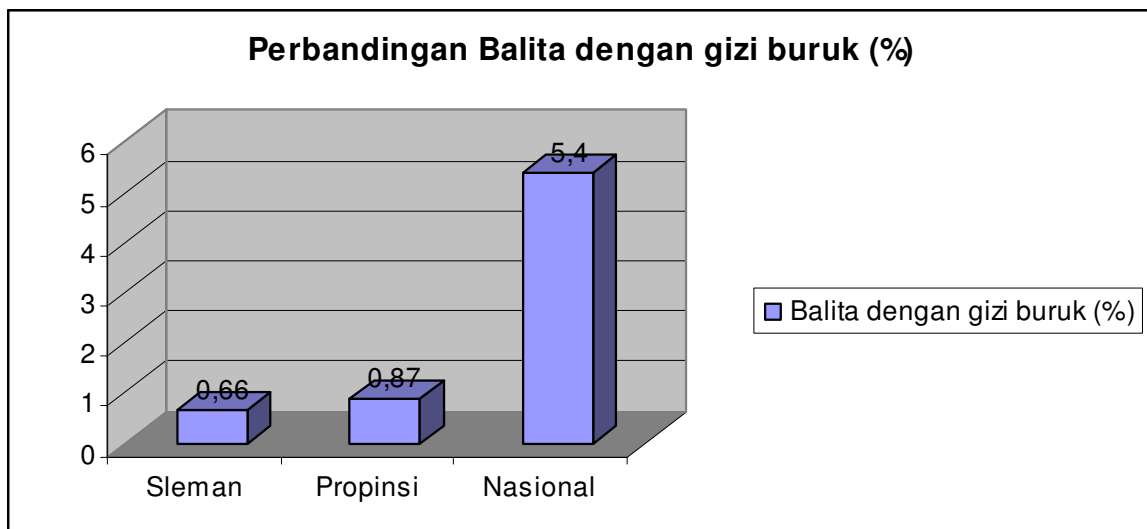
Balita dengan gizi buruk dua tahun terakhir mengalami penurunan yaitu tahun 2008 sebesar 0,54 %, tahun 2009 sebesar 0,53 %, sedangkan untuk tahun 2010 meningkat menjadi 0,66%. Meningkatnya balita dengan gizi buruk karena sebagian program upaya peningkatan gizi bagi balita yang berupa pemberian susu sebagai makanan tambahan tidak terlaksana, hal tersebut dikarenakan



Pemerintah Kabupaten Sleman gagal dalam melaksanakan pelelangan sampai 2 kali pelelangan, sebelum pelelangan ulangan dilaksanakan terjadi bencana erupsi Merapi. Selain itu bencana erupsi Merapi berdampak pada banyaknya balita yang kurang mendapatkan asupan makanan bergizi.

Meskipun capaian kinerja balita dengan gizi buruk dalam kategori tidak berhasil, namun jika dibandingkan dengan angka gizi buruk tingkat propinsi DIY sebesar 0,87% dan tingkat nasional sebesar 5,40%, maka angka gizi buruk di Kabupaten Sleman masih lebih baik.

**Grafik 8 Perbandingan Balita Gizi Buruk Tingkat Kabupaten Sleman, Propinsi DIY, dan Nasional.**



Sasaran tersebut dicapai melalui program utama yaitu :

1. Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan.

Jumlah kegiatan seluruhnya sebanyak 63 kegiatan dengan capaian indikator kinerja out put rata-rata 99,94% dari target yang ditentukan di dukung dengan dana sebesar Rp47.872.065.500,00 (83,94% )dari anggaran sebesar Rp57.025.849.700,00.



Dari 63 kegiatan, terdapat 3 kegiatan yang tidak mencapai target kikerja out put yaitu:

1. Pengkajian lingkungan sehat (capain kinerja out put 80%)
2. Evaluasi dan pengembangan standart kesehatan (capain kinerja out put 50%)
3. Kegiatan Pemberian tambahan makanan dan vitamin tidak dapat dilaksanakan, menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya indikator AKI dan balita dengan gizi buruk.

Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan realisasi capaian kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2009			2010		
	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja
Usia Harapan hidup	74,6 Th.	74,76 Th.	100,21	74,90 Th.	74,74 Th.	98,79
Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	≤ 10	4,08	100	7,63	5,78	124,25
Angka kematian ibu melahirkan	69,31	69,31	100	10	13	70,00
Balita dengan gizi buruk	0,46	0,53	84,78	0,45	0,66	53,33

Prestasi yang dicapai kabupaten Sleman selama tahun 2010 di bidang kesehatan yaitu:

1. Penghargaan kepada Bupati Sleman bidang kesehatan tingkat nasional, Manggala Karya Bakti Husada Aditya;
2. SMPN 4 Ngaglik juara harapan III lomba sekolah sehat tingkat nasional;
3. SMKN 1 Depok dan SMPN Berbah juara 1 lomba sekolah sehat tingkat propinsi DIY dan maju tingkat nasional;
4. Kecamatan Moyudan juara II evaluasi GSI tingkat propinsi DIY;
5. Juara II lomba petugas gizi teladan tingkat propinsi DIY an Niken Kuntolowati.



Faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat :

1. Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang tersebar merata di wilayah Kabupaten Sleman (Puskesmas, RS/ RB, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta dan lain-lain).
2. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
3. Kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan melalui penerapan standar pelayanan ISO 9001:2000 dan standar pelayanan ISO 2001:2008 pada 16 puskesmas akan terus dikembangkan ke Puskesmas lain secara bertahap.

**Hambatan/ masalah :**

1. Masih adanya anemi gizi pada ibu hamil
2. Masih adanya kasus balita gizi buruk dari kelompok keluarga miskin
3. Adanya sebagian masyarakat berperilaku buruk pada kesehatan lingkungan

**Strategi/ upaya pemecahan:**

1. Pemberian makanan tambahan dan tablet FE pada ibu hamil
2. Surveilans Gizi, penanganan gizi buruk dan pemberian makanan tambahan pada balita
3. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

**Sasaran 16 :**

**“Meningkatnya Keluarga Sejahtera”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya keluarga dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 45,9 % dengan kategori predikat ***Tidak Berhasil..***

Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:



1. Laju Pertumbuhan Penduduk dengan angka capaian kinerja sebesar 37,84.
2. Jumlah kelahiran per 1000 penduduk dengan angka capaian kinerja sebesar 0.
3. Tingkat kesejahteraan keluarga keluarga sejahtera dengan angka capaian kinerja sebesar 100.

Untuk pencapaian sasaran tersebut melalui program utama peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan manajemen kependudukan dengan 8 kegiatan; capaian kinerja indikator kegiatan (out put) utama rata-rata 100 % dari target yang ditentukan dengan dukungan dana sebesar Rp509.624.100,00 (98,87%) dari anggaran sebesar Rp515.463.500,00.

Penyebab tidak tercapainya sasaran tersebut tidak seluruhnya memberikan opini negatif tetapi juga menunjukkan opini positif, seperti uraian berikut ini:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk, persentase pencapaian rencana sebesar 37,84% atau terealisasi 1,80% dari rencana 1,11%.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman selama 4 (empat) tahun terakhir berfluktuatif yaitu tahun 2007 sebesar 1,40%, tahun 2008 sebesar 1,86 %, tahun 2009 sebesar 1,28 % dan tahun 2010 sebesar 1,80 %.

Tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman, tidak berarti kegagalan program Keluarga Berencana (KB) sebagai bukti peserta KB aktif tahun 2010 sebanyak 121.531 pasangan atau mencapai 80,17% dari Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 151.600 pasangan; juga terdapat peserta KB baru sebanyak 12.155 pasangan.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk bukan karena pertumbuhan alami tetapi lebih disebabkan oleh faktor migrasi yang tinggi. Pertumbuhan alami adalah merupakan selisih jumlah lahir dikurangi jumlah mati, sedangkan migrasi dilihat dari jumlah datang dan jumlah pergi.

Tingginya migrasi penduduk di Kabupaten Sleman, menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman merupakan wilayah strategis dalam beberapa aspek kehidupan; antara lain banyaknya sekolah dan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta, perusahaan, hotel dan jasa usaha lainnya serta terpenuhinya fasilitas-fasilitas umum lainnya.



Sebagai pendukung dapat dilihat data dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 11 Mutasi Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2009 – 2010 .**

No	Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Penduduk lahir (jiwa)	10.967	6.762
2	Penduduk mati (jiwa)	4.806	3.081
3	Penduduk datang (jiwa)	17.840	14.056
4	Penduduk pergi (jiwa)	11.507	8.536

2. Jumlah kelahiran per 1000 penduduk, persentase pencapaian rencana sebesar - 311,77% atau terealisasi 8,7 per 1000 penduduk dari rencana 1,70 per 1000 penduduk.

Pengukuran indikator tersebut berdasarkan jumlah kelahiran yang dicatatkan; dari hasil pengukuran capaian kinerja termasuk tidak berhasil, namun apabila dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 9,94% terjadi penurunan sebesar 1,24%.

Seperti uraian pada indikator nomor 1 (Laju Pertumbuhan Penduduk), tingginya jumlah kelahiran per 1000 penduduk di Kabupaten Sleman, tidak berarti karena kegagalan program Keluarga Berencana tetapi lebih disebabkan pada :

- a. Semakin tingginya tingkat kesadaran penduduk untuk segera mencatatkan kelahiran anggota keluarganya sedini mungkin. Hal ini dipengaruhi adanya pencatatan/pembuatan Akta Kelahiran yang tidak dipungut biaya/gratis bagi pencatatan belum terlambat (1 – 60 hari setelah kelahiran), dengan azas pencatatan tempat kejadian kelahiran, termasuk penduduk luar Sleman yang melahirkan di rumah sakit/Balai Bersalin/Pelayanan Kesehatan di wilayah Kabupaten Sleman.
- b. Selain itu Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2010 (151.600 PUS) lebih tinggi dari tahun 2009 ( 149.299 PUS).



3. Tingkat kesejahteraan keluarga keluarga sejahtera, persentase pencapaian rencana sebesar 117,14% atau terealisasi 87,74% dari rencana 74,90%.

Tingkat kesejahteraan keluarga keluarga sejahtera 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2007 sebesar 76,9 %, tahun 2008 sebesar 77,8 %, tahun 2009 sebesar 88,01% sedangkan tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 87,74 %, salah satu sebabnya antara lain adanya bencana gunung merapi.

**Hambatan/masalah :**

Peserta KB pria masih rendah.

**Strategi / upaya pemecahan :**

Meningkatkan pemahaman kepada kaum pria melalui penyuluhan-penyuluhan bahwa program KB tidak hanya menjadi tanggungjawab perempuan/ibu.

**Sasaran 17 :**

**“Meningkatnya kesejahteraan pekerja”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kesejahteraan pekerja dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 60,42 dengan predikat **Cukup Berhasil..**

Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dengan angka capaian kinerja 5,22.
2. Penyerapan lulusan pasca pelatihan kerja dengan angka capaian kinerja 100.
3. Penempatan tenaga kerja terdaftar dengan angka capaian kinerja 76,04.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja, persentase pencapaian rencana sebesar 5,22% atau terealisasi 0,26% dari rencana 4,98%.

Capaian kinerja dalam kategori tidak berhasil karena dipengaruhi beberapa hal :

- a. Adanya tenaga kerja dari luar daerah yang terkena PHK dan kembali ke tempat asal yaitu Kabupaten Sleman.



- b. Adanya erupsi Merapi menyebabkan banyaknya sektor informal di bidang peternakan, pertanian, dan UMKM yang ada di Kecamatan Cangkringan, Pakem, Ngemplak dan Turi mengalami gulung tikar.
  - c. Adanya perusahaan, hotel dan penginapan yang tutup sementara sejumlah 329 perusahaan/hotel/penginapan dengan jumlah tenaga kerja sejumlah 3123 orang.
2. Penyerapan lulusan pasca pelatihan kerja, persentase pencapaian rencana sebesar 111,67% atau terealisasi 67% dari rencana 60%.

Penyerapan lulusan pasca pelatihan 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu tahun 2007 sebesar 55,7%, tahun 2008 sebesar 55,84%, tahun 2009 sebesar 62,68% dan tahun 2010 sebesar 67%. Keberhasilan tersebut selain karena adanya upaya membuka jejaring dengan dunia usaha, juga karena dengan kualitas pelatihan yang semakin meningkat serta bekal peralatan (barang penghargaan) yang diberikan pasca pelatihan, sangat membantu para alumni untuk membuka usaha secara mandiri, bahkan dapat menyerap tenaga kerja walaupun dalam jumlah kecil.

3. Penempatan tenaga kerja terdaftar, persentase pencapaian rencana sebesar 76,04% atau terealisasi 17,49% dari target 23%.

Pada tahun 2010 penempatan tenaga kerja melalui program AKL (angkatan kerja lokal) yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dari target 600 orang, realisasinya mencapai 4.940 orang atau 823,4%. Sedangkan program AKAD, walaupun mengalami penurunan namun setiap tahunnya selalu melebihi target yang ditentukan (rata-rata target 300 orang/tahun). Pada tahun 2010 target 300 orang terealisasi 351 orang atau 117%.

Keberhasilan tersebut dicapai karena adanya komunikasi dan kerja sama yang baik dengan pihak swasta/perusahaan, baik yang ada di dalam Propinsi DIY maupun di luar Propinsi seperti Batam, Bogor dan lain-lain sehingga arus informasi lowongan kerja lancar, demikian pula dalam hal perekrutan tenaga kerja asal Kabupaten Sleman sekaligus penempatannya.



Sasaran-sasaran tersebut dicapai melalui program utama informasi kerja dan kualitas penempatan tenaga kerja dengan 14 kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp1.204.947.230,00 (78,19%) dari anggaran sebesar Rp1.540.940.100,00.

Dari 14 kegiatan tersebut, terdapat 5 kegiatan yang capaian kinerja out put tidak tercapai sampai dengan akhir bulan Oktober 2010 sehingga sisa anggaran dialihkan untuk tanggap darurat bencana Merapi; yang menjadi salah satu penyebab capaian kinerja sasaran belum optimal, yaitu:

1. Fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi dengan capaian kinerja 63%
2. Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari kerja dengan capaian kinerja 54%
3. Pengadaan peralatan Pendidikan dan Ketrampilan bagi pencari kerja dengan capaian kinerja 75%
4. Penyusunan Proses Mekanisme Perijinan Tempat Uji Kompetensi Kab. Sleman dan Penyusunan informasi bursa Tenaga Kerja tidak terlaksana

**Hambatan / masalah :**

1. Kesempatan kerja/lowongan kerja yang terbatas
2. Belum sebandingnya ketersediaan tenaga kerja terlatih yang dapat mengisi kebutuhan pasar kerja

**Strategi / upaya pemecahan :**

1. Mengembangkan kualitas pelatihan kerja, penempatan dan kesempatan kerja serta mendorong usaha-usaha mandiri
2. Mengembangkan informasi bursa kerja.

**Sasaran 18 :**

**“Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 dengan predikat **Sangat Berhasil**.





Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Proporsi KK miskin terhadap jumlah KK dengan angka capaian kinerja sebesar 100.
2. Proporsi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap banyaknya penduduk dengan angka capaian kinerja sebesar 100.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

1. Proporsi KK miskin terhadap jumlah KK, persentase pencapaian rencana sebesar 140,96% atau terealisasi 14,82% dari rencana 25,10%.

KK miskin tahun 2010 sebanyak 57.979 KK sedangkan jumlah KK Kabupaten Sleman 391.106 KK.

Proporsi KK miskin terhadap jumlah KK selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir terjadi penurunan yaitu tahun 2007 sebesar 23,40%, tahun 2008 sebesar 22,30%, tahun 2009 sebesar 22,17% dan tahun 2010 sebesar 14,82%.

2. Proporsi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap banyaknya penduduk, persentase pencapaian rencana sebesar 139,28% atau terealisasi 3,28% dari rencana 5,40%.

Proporsi PMKS terhadap jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 3,28% atau menurun dibandingkan tahun 2009 sebesar 4,8%. Keberhasilan capaian indikator tersebut berkat keberhasilan penanganan PMKS oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Pada tahun 2010 telah tertangani sebanyak 215.578 orang PMKS. Disamping itu ada PMKS yang ditangani oleh keluarga atau masyarakat, seperti penyandang cacat dari keluarga mampu. Adapun penyebaran PMKS dibagi dalam 15 jenis seperti dalam tabel, sebagai berikut :



**Tabel 12 PMKS Kabupaten Sleman Tahun 2010.**

No.	Uraian	Jumlah	Prosentase
1.	Anak Balita Terlantar	1.382	3.77
2.	Anak Terlantar	9.639	26.30
3.	Anak Nakal	242	0.66
4.	Anak Jalanan	88	0.24
5.	Korban Tindak Kekerasan	8.877	24.22
6.	Lanjut Usia Terlantar	4.926	13.44
7.	Penyandang Cacat	8.808	24.04
8.	Tuna Susila	87	0.24
9.	Pengemis	38	0.10
10.	Gelandangan	58	0.16
11.	Korban Penyalahgunaan Napza	814	2.22
12.	Pekerja Migran Bermasalah	330	0.90
13.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2.812	7.67
14.	Keluarga Berumah Tak Layak Huni	4.492	12.26
15.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	1.051	2.87

Sasaran tersebut dicapai melalui program utama peningkatan kualitas penanganan permasalahan sosial dengan 21 kegiatan, capaian kinerja indikator output rata-rata 87,43% dari target yang ditentukan dengan dukungan dana sebesar Rp1.527.964.676,00 (82,93%) dari target sebesar Rp3.427.032,00.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut adalah :

1. Memberikan peluang dan fasilitasi seluas-luasnya kepada KK miskin untuk berusaha secara mandiri maupun berkelompok guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
2. Memberdayakan masyarakat miskin melalui pelatihan-pelatihan ketrampilan dan usaha-usaha ekonomi produktif serta stimulan sesuai keinginannya
3. Meningkatkan kapasitas SDM melalui peningkatan kewirausahaan, ketrampilan, pengetahuan dan wawasan sehingga dapat menangkap peluang-peluang yang ada untuk berusaha dan memenuhi kebutuhan hidup secara layak



4. Memberikan bantuan dan jaminan sosial yang bersifat insidentil maupun berkelanjutan

**Hambatan/masalah :**

1. Keterbatasan akses orang PMKS termasuk orang miskin terhadap fasilitas-fasilitas ekonomi, sosial dan pendidikan
2. Masih rendahnya apresiasi keluarga dan masyarakat terhadap PMKS khususnya ketunaan
3. Potensi-potensi sosial yang ada di masyarakat belum berperan maksimal karena belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan

**Strategi/pemecahan :**

1. Memperluas usaha-usaha kesejahteraan sosial dan memperkuat usaha-usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial
2. Mengembangkan sistem jaminan dan bantuan sosial
3. Meningkatkan koordinasi dan mengintegrasikan penanganan keluarga miskin antar SKPD dan Non Government Organisation (NGO) / lembaga-lembaga sosial masyarakat untuk meningkatkan peran relawan dan lembaga-lembaga sosial.

**Sasaran 19 :**

**“Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kekayaan Budaya”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 90,88 dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Pelestarian situs sejarah dengan angka capaian kinerja sebesar 93,33.
2. Pengembangan keragaman seni dengan angka capaian kinerja sebesar 100.



3. Pelestarian nilai-nilai adat dengan angka capaian kinerja sebesar 76,92.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pelestarian situs sejarah, persentase pencapaian rencana sebesar 95,71% atau terealisasi 70 lokasi dari rencana 75 lokasi.

Adapun situs sejarah yang telah diupayakan pelestariannya seperti dibawah ini:

- a. Tetenger/Monumen Perjuangan : 33 lokasi
- b. Bangunan candi : 5 lokasi
- c. Museum : 8 lokasi
- d. Situs : 10 lokasi
- e. Masjid Pathok Negoro : 2 lokasi
- f. Pesanggrahan : 2 lokasi
- g. Rumah tradisional : 15 lokasi

2. Pengembangan keragaman seni, persentase pencapaian rencana sebesar 100,11% atau terealisasi 893 kelompok dari target 892 kelompok. Tercapainya Indikator sasaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah potensi seni awal : 887 kelompok

Pengembangan kelompok seni : 6 kelompok

Jumlah kelompok seni : 893 kelompok

Pengembangan kelompok seni dimaksud antara lain:

- a. Dadungawuk : 1 kelompok
- b. Topeng Ireng/Dayakan : 2 kelompok
- c. Akapela : 1 kelompok
- d. Jathilan : 1 kelompok
- e. Karawitan : 1 kelompok

3. Pelestarian nilai-nilai adat, persentase pencapaian rencana sebesar 76,92% atau terealisasi 10 jenis dari target 13 jenis.



Pengukuran terhadap indikator pelestarian nilai-nilai adat yaitu jumlah dari tradisi budaya yang telah ditetapkan dalam kalender pariwisata budaya Kabupaten Sleman; sampai dengan tahun 2010 telah terdapat 10 jenis upacara adat dalam kalender pariwisata budaya Kabupaten Sleman. yaitu:

- a. Upacara adat Saparan Wonolelo setiap tanggal 7 Sapar
- b. Upacara adat Saparan Bekakak setiap tanggal 15 Sapar
- c. Upacara adat Tunggularum setiap tanggal 15 Sapar
- d. Upacara adat Tawur Agung setiap tanggal 28 Mulud
- e. Upacara adat Breges setiap tanggal 27 Jumadilakhir
- f. Upacara adat Labuhan Merapi setiap tanggal 30 Ruwah
- g. Upacara adat Tuk Sibedug setiap tanggal 6 Sya'ban
- h. Upacara adat Merti Bumi Kaliurang setiap tanggal 29 Suro
- i. Upacara adat Merti Bumi Kaliurang setiap tanggal 7 Sapar
- j. Upacara adat Batok Bolu setiap tanggal 9 Sapar

Untuk pengembangan pelestarian nilai-nilai budaya, terdapat 3 jenis tradisi budaya berpotensi besar untuk dapat dimasukkan dalam kalender pariwisata budaya Kabupaten Sleman, yaitu:

- a. Tradisi Budaya Ngrowod Girikerto Turi;
- b. Tradisi Budaya Merti Dusun Ketingan Tirtoadi Mlati;
- c. Tradisi Budaya Merti Dusun Kwagon Sidorejo Godean.

Tetapi masih terdapat kendala antara lain: kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara rutin dan kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya.

Prestasi yang dicapai Kabupaten Sleman selama tahun 2010 di bidang budaya yaitu:

1. Juara I Tingkat Propinsi DIY : Seleksi Parade Tari Daerah
2. Juara II Tingkat Propinsi DIY : Seleksi Parade Tari Daerah
3. Penyaji Terbaik II Tingkat Nasional : Seleksi Parade Tari Daerah
4. Juara III Tingkat Propinsi DIY : Gelar Seni Pertunjukan



5. Juara III Tingkat Propinsi DIY : Festival Sendratari

6. Juara II Tingkat Propinsi DIY : Festival Kethoprak

Sasaran-sasaran tersebut dicapai melalui program utama yaitu:

1. Program Peningkatan Pengelolaan Nilai-Nilai Luhur Budaya;
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
3. Program Pengembangan Nilai Budaya;
4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Jumlah kegiatan utama seluruhnya sebanyak 6 kegiatan dengan capaian kinerja indikator out put rata-rata 95% dari target yang ditentukan dengan dukungan dana sebesar Rp974.668.000,00 (94,69%) dari anggaran sebesar Rp1.029.251.000,00; sehingga daya dukung terhadap pencapaian kinerja sasaran tersebut signifikan.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal;
2. Meningkatnya kualitas seni budaya dan pelestarian lingkungan benda cagar budaya;
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya.

**Hambatan/masalah dalam pencapaian target sasaran:**

1. Kemampuan masyarakat dalam memilih nilai budaya masih kurang;
2. Pelaksanaan kegiatan Upacara Adat dan Tradisi Budaya terkesan monoton dan sulit berkembang, masyarakat kurang dapat memanfaatkannya sebagai sarana untuk peningkatan perekonomian.

**Strategi/upaya pemecahan masalah:**

1. Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap pengaruh negatif budaya luar dengan kearifan lokal;
2. Melakukan pembinaan agar masyarakat mampu memahami fungsi dan arti kegiatan upacara adat dan tradisi budaya serta dapat memanfaatkannya untuk peningkatan taraf hidup.